

# **PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BATURETNO I PASCA REVITALISASI DALAM PERSPEKTIF *CAPACITY BUILDING***

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**AYU RAHMA DARWATI**  
**NIM. 145030101111046**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2018**

## MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu me-nyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;*

*Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

(Al-Baqarah: 216)

*“Once you make a decision  
the universe conspire to make it happen”*

—Ralph Waldo E

*“Bahkan do’a yang tak pernah kau lisankan sekali pun  
di amini-Nya, percayalah”*

—Ayu Rahma D



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca  
Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Building*

Disusun oleh : Ayu Rahma Darwati

NIM : 145030101111046

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 16 Mei 2018

Komisi Pembimbing,

Dr., Sarwono., M.Si  
NIP. 19570909 198403 1 002

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Ayu Rahma Darwati

NIM : 145030101111046

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Juli 2018  
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Ayu Rahma Darwati  
Judul : Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Building*.

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

  
Drs., Sarwono., M.Si  
NIP. 19570909 198403 1 002

  
Dr. Siti Rochmah., M.Si  
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota



Drs. Minto Hadi., M.Si  
NIP. 19540127 198103 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN



***Skripsi ini saya persembahkan untuk  
ayah dan ibu tercinta;  
Bapak Sudarmadi dan Ibu Katirah, serta  
adik saya terkasih; Aris Mahendra Elvin***



## RINGKASAN

Ayu Rahma Darwati, 2018. **Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Building***. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr., Sarwono., M. Si. 174 halaman + xix

---

Program revitalisasi yang dilakukan pemerintah baik pusat atau pun daerah sejauh ini hanya sebatas fisik bangunan pasar, revitalisasi terhadap pengelolaan pasar belum banyak dilakukan. Ketidakjelasan pengelolaan pasar akan menciptakan kesemerawutan kondisi pasar. Sehingga akan sulit menghilangkan citra negatif yang telah melekat pada pasar tradisional. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendorong profesionalisasi pengelolaan aset pasar, maka perlu dilakukan reformasi pengelolaan pasar pasca revitalisasi secara profesional dan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan merekomendasikan pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi dalam perspektif *capacity building*. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan pasar yang telah dilakukan baik pra revitalisasi mau pun pasca revitalisasi, menganalisis kritik dan saran yang muncul sebagai acuan dalam merekomendasikan pengelolaan di Pasar Tradisional Baturetno I. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti *interview guide*, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi masih menggunakan sistem tradisional dan belum berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dilihat dari: a) sistem penarikan retribusi b) sistem keamanan dan ketertiban, c) sistem kebersihan dan penanganan sampah, d) sistem perparkiran, dan e) sistem pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu, peneliti melakukan kajian untuk mengetahui pengelolaan pasar yang telah dilakukan pasca revitalisasi, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan dalam pengelolaan pasar pasca revitalisasi, hal ini dapat diketahui melalui kritik dan saran dari para *stakeholders* pasar. Sehingga, memunculkan alternatif pengelolaan pasar baru yang dapat penulis rekomendasikan berdasarkan perspektif *capacity building*, antara lain: 1) Strategi jangka pendek yang terdiri dari: a) Pengelolaan manajemen pasar; (1) pembentukan tim khusus pemeliharaan sarana dan prasarana, (2) penerapan sistem e-retribusi, (3) penerapan sistem parkir portal elektronik berbasis komputer, (4) pemberian papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi, (5) melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce reuse, recycle*), dan (6) peningkatan pelayanan keamanan

pencegahan dan pemadam kebakaran , b) Menentukan kelembagaan pengelolaan pasar, c) Memaksimalkan pendapatan pasar, d) Mengadakan pertemuan secara rutin terkait peningkatan pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I, e) Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang, f) Reformasi peraturan, g) Pengadaan fasilitas umum; CCTV, ruang bersama, sarana telekomunikasi, koperasi pasar. 2) Strategi jangka panjang; Pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



## SUMMARY

Ayu Rahma Darwati, 2018. *Traditional Market Management of Baturetno I Post Revitalization Based on Capacity Building Perspective*. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr., Sarwono., M.Si. 174 pages + xix

---

The government's revitalization program whether in the central or regional, has so far been limited to physical market building, revitalization of market management has not been done. Obscurity of market management will create a chaotic market condition. It will be difficult to eliminate the negative image that has been attached to the traditional market. Therefore, in order to encourage professionalization of market asset management, it is necessary to reform the market management post revitalization in a professional and modern way.

This research aims to know, to analyze and to recommend traditional market management of Baturetno I post revitalization based on capacity building perspective. Therefore the researcher interested to know the market management that has been done, analyze the criticisms and suggestions that emerged as a reference in recommending the management for Baturetno I traditional market. This research uses descriptive research type with qualitative approach. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Techniques of collecting data are through interviews, observation and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guide, and other aids.

The result of research indicates that the pre-revitalized traditional market management of Baturetno I is still using traditional system and not yet based on good governance principles as seen from: a) retribution system b) security and order system, c) sanitation and waste management system, d) parking system, and e) facilities and infrastructure maintenance system. In addition, the researcher conducts a study to find out the market management that has been done after the revitalization, the result shows that there is no change in market management post revitalization, this can be known through criticisms and suggestions from the market stakeholders. Thus, it raises new market management alternatives that researcher can recommend based on capacity building's perspective, i.e: 1) Short-term strategies consisting of; a) Management of market management; (2) application of e-retribution system, (3) implementation of computer-based electronic portal parking system, (4) naming of zoning location, (5) performing waste management with the concept of 3R (reduce reuse, recycle), and (6) preventive and firefighting security services improvement, b) Determine the market management institutional, c) Maximize market revenues, d) Conduct regular meetings related to improving the traditional market management of Baturetno I, e) Increasing basic knowledge for

marketeers, f) Regulatory reform, g) Public facilities procurement; CCTV, shared space, tools of communication, market cooperatives. 2) Long-term strategy; Market management by Regional Owned Enterprises (BUMD).





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Building***”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua penulis, Bapak Sudarmadi dan Ibu Katirah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan do’a serta dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof., Dr., Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs., Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr., Sarwono, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasihat, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.

5. Bapak Dr., Fadillah Amin., M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf/Pegawai Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Agus Suprihanto selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung.
9. Seluruh staff pengelola Pasar Tradisional Baturetno I, khususnya bapak Margiono dan bapak Wiyono yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
10. Sahabatku yaitu Anastasia J Biantong, Desi Sintia Liani, Andini Anggita Sari, Diva Amalia, dan Ristya Amalia yang telah menjadi teman baik selama penulis menempuh studi. Tifana Rasyita Gani, sahabat baik dikala suka dan duka. Teman-teman yang tidak henti-hentinya memberi dukungan (Fifin, Tika, Windi, Yayan, Widhi, Anggit, Rizal, Leli, Eva Alfia, Yazin, Mario, Toni, Toni Agam dan

Qirom yang telah membantu selama penulis mengurus perizinan di Surabaya), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, do'a serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Leo Club Malang Arrow yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, terima kasih untuk kesempatan yang pernah diberikan. We Serve!

12. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
 <b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Administrasi Publik.....	18
1. Pengertian Administrasi Publik.....	18
2. Fungsi Administrasi Publik.....	20
3. Paradigma Administrasi Publik.....	21
B. Administrasi Pembangunan.....	28
C. Reformasi Administrasi.....	32
D. <i>Good Governance</i> .....	34
1. <i>Governance</i> (Kepemerintahan).....	34
2. <i>Good Governance</i> .....	36
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	38
E. Pengembangan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ).....	40
1. Pengertian Pengembangan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ).....	40
2. Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ).....	43
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ).....	45
F. Pasar.....	47

1. Pengertian Pasar.....	47
2. Jenis-jenis Pasar.....	49
a) Pasar Tradisional.....	49
b) Pasar Modern.....	50
3. Fungsi Pasar.....	51
G. Revitalisasi.....	54
1. Pengertian Revitalisasi.....	54
2. Revitalisasi Pasar Tradisional.....	54
H. Kerangka Pemikiran.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Fokus Penelitian.....	59
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	61
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Instrumen Penelitian.....	66
G. Analisis Data.....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Wonogiri.....	71
a) Arti Lambang.....	71
b) Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.....	73
c) Letak Geografis.....	78
d) Potensi Pengembangan Wilayah.....	81
e) Aspek Demografis.....	83
f) Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	84
g) Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri.....	90
B. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	92
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.....	92
a) Sejarah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.....	92
b) Tupoksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.....	93
c) Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.....	98
2. Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri.....	99
a) Sejarah Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri.....	99
b) Aparat Pasar/Unit Pengelola Pasar Daerah	

Baturetno Kabupaten Wonogiri.....	101
c) Inventaris Kantor Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri.....	103
d) Fasilitas Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri.....	104
C. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	105
1. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pra Revitalisasi yang Telah Dilakukan.....	105
a) Sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar.....	105
b) Sistem keamanan dan ketertiban.....	112
c) Sistem kebersihan dan penanganan sampah.....	114
d) Sistem Perparkiran.....	119
c) Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana.....	120
2. Kritik dan Keluhan dari <i>Stakeholders</i> Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I.....	124
3. Strategi Pengelolaan Pasar Baturetno I Pasca Revitalisasi yang dapat dilakukan dalam Perspektif <i>Capacity Bulding</i> .....	126
D. Pembahasan.....	145
1. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pra Revitalisasi yang Telah Dilakukan.....	145
a) Sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar.....	145
b) Sistem keamanan dan ketertiban.....	146
c) Sistem kebersihan dan penanganan sampah.....	146
d) Sistem Perparkiran.....	149
c) Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana.....	150
2. Kritik dan Keluhan dari <i>Stakeholders</i> Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I.....	151
3. Strategi Pengelolaan Pasar Baturetno I Pasca Revitalisasi yang dapat dilakukan dalam Perspektif <i>Capacity Bulding</i> .....	153

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>167</b>
A.	Kesimpulan.....	167
B.	Saran.....	171

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015	8
2.	Jenis Pasar dan Jumlah di Kabupaten Wonogiri	9
3.	Perbandingan Karakteristik Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	30
4.	Kerangka Pemikiran	57
5.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2015–2016	82
6.	Perkembangan Penduduk Wonogiri Tahun 2011-2015	84
7.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2015	85
8.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015	86
9.	Laju Inflasi Di Wonogiri Tahun 2011-2015	89
10.	Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri	90
11.	Aparat Pasar Tradisional Baturetno I/Pengelola Pasar Tradisional Baturetno I	102
12.	Daftar Inventaris Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri Tahun 2018	103
13.	Daftar Fasilitas Pasar Baturetno I Kabupaten Wonogiri Tahun 2018	105
14.	Jenis Retribusi dan Tarif Retribusi di Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri	109
15.	Sarana dan Prasara Pasar Tradisional Baturetno	120
16.	Rekapitulasi Hasil Penelitian	160



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Presentase Penurunan Jumlah Pasar Tradisional	2
2.	Prinsip Revitalisasi Pasar Tradisional	4
3.	Kondisi Pasar Darurat Baturetno I Kabupaten Wonogiri	10
4.	Revitalisasi Fisik Pasar Tradisional Baturetno I	11
5.	Komponen Analisis Data Model Interaktif	68
6.	Lambang Kabupaten Wonogiri	71
7.	Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri	79
8.	Proses Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	127
9.	Proses Penarikan Sistem E-Retribusi	128
10.	Alur Pengelolaan Sampah Pasar	132
11.	Proses Penentuan Kelembagaan Pasar	136
12.	Matrik Ringkasan Hasil Penelitian	166



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1.	Surat Rekomendasi Penelitian
2.	Struktur Organisasi Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri
3.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021
4.	Dokumentasi
5.	<i>Curicullum Vitae</i>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

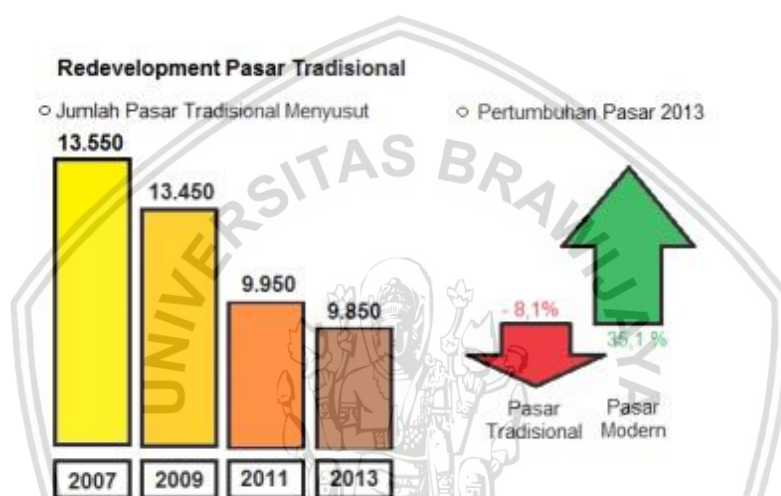
Adanya globalisasi menyebabkan perubahan pola hidup perilaku konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya banyak konsumen memilih pasar modern. Padahal keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat dalam sektor perdagangan. Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa;

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Berdasarkan pengertian tentang pasar tradisional diatas dapat dikatakan bahwa pasar tradisional memiliki suatu ciri khas yaitu proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Disisi lain, pasar tradisional memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang menyebabkan menurunnya minat untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional.

Secara nasional perkembangan pasar tradisional memang mengalami penurunan apabila dibanding dengan perkembangan pasar modern, hal tersebut sebagaimana hasil survey A.C. Nielsen pada tahun 2013 terhadap perkembangan Pasar Modern dan Tradisional di Indonesia. Berdasarkan hasil survey A.C.

Nielsen pada tahun 2013 menunjukkan jumlah pasar tradisional di Indonesia terus mengalami penurunan (Gambar 1.1). Pada tahun 2000 masih terdapat 78,3% pasar tradisional dari jumlah pasar, namun pada tahun 2005 jumlahnya menurun menjadi 70,5% pasar tradisional. Bahkan pada tahun 2008 diperkirakan jumlah pasar tradisional berkurang menjadi hanya 65% dari total jumlah pasar tradisional di Indonesia.



**Gambar 1.1 Presentase Penurunan Jumlah Pasar Tradisional**

*Sumber: Survey A.C. Nielsen 2013.*

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pasar-pasar tradisional dalam mengantisipasi kecenderungan penurunan keberadaan pasar tradisional. Hal tersebut bertujuan agar pasar tradisional tetap eksis di masa sekarang dan mendatang. Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai tempat transaksi jual beli dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu pasar tradisional sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pasar.

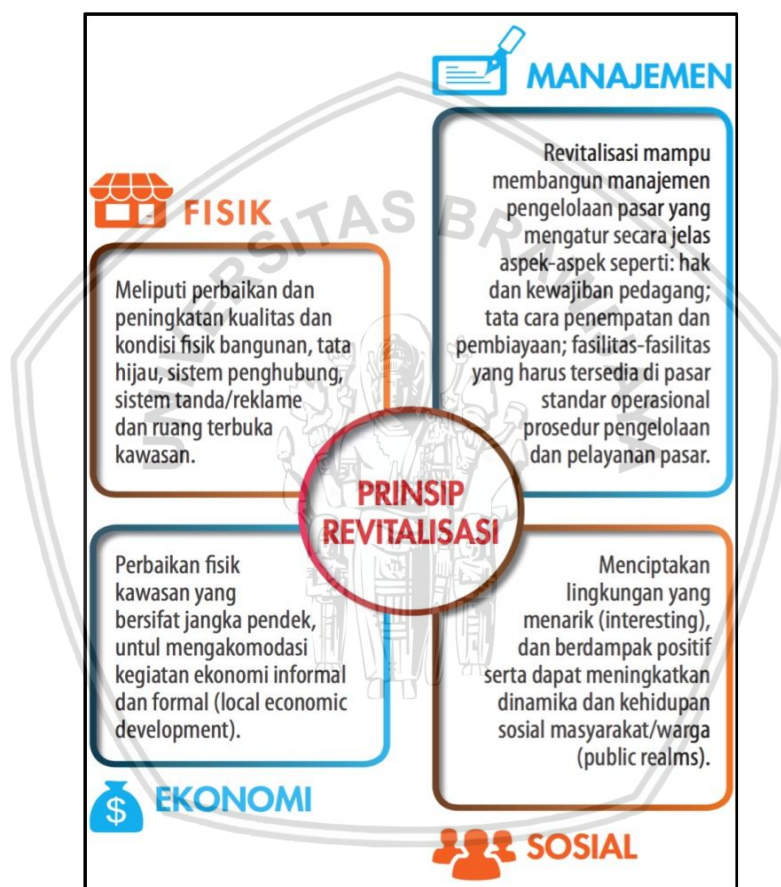
Pasar tradisional identik dengan citra buruk seperti kondisi pasar yang kumuh, kotor dan bau sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak nyaman

untuk berbelanja. Kondisi lain yang telah menjadi karakter dasar pasar tradisional yang sulit diubah, mulai dari faktor desain bangunan, tata ruang, tata letak, dan tampilan yang tidak sebaik pusat perbelanjaan modern, waktu operasional yang relatif terbatas, kurangnya teknologi yang digunakan, kualitas barang yang kurang baik, rendahnya tingkat keamanan, kesemrawutan penataan parkir, hingga berbagai isu yang merusak citra pasar tradisional. Sebaliknya, pusat perbelanjaan modern memberikan suasana berbelanja yang nyaman serta dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sehingga dengan fasilitas belanja yang bersih dan higienis, maka tidak salah apabila konsumen lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern dibandingkan pasar tradisional (Ayuningsasi, 2012:2).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk mengatasi citra negatif yang telah melekat pada pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional berarti perubahan fisik dan pengelolaan secara modern dari segi pelayanan, kebersihan dan kenyamanan. Program revitalisasi tersebut tertuang dalam Nawacita Jokowi program 5.000 pasar (tahun 2015 s/d 2019). ([kemendag.go.id](http://kemendag.go.id)). Tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendag terhadap kebijakan revitalisasi pasar tradisional yaitu; 1) untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui retribusi pasar dan parkir, 2) meningkatkan pendapatan pedagang, 3) meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pembeli serta untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional.

Terdapat empat prinsip revitalisasi pasar tradisional yang dapat dilakukan. Pertama, adalah kegiatan revitalisasi pasar tradisional secara fisik dengan penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang fungsi pasar. Kedua,

revitalisasi manajemen terkait tentang pengelolaan pasar tradisional. Ketiga, revitalisasi ekonomi dan yang terakhir yaitu revitalisasi sosial. Sehingga, dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional harus mencakup prinsip-prinsip tersebut agar tetap menjaga eksistensi pasar dengan kondisi lebih baik.



**Gambar 1.2 Prinsip Revitalisasi Pasar Tradisional**

*Sumber: Ews.kemendag.go.id*

Meskipun bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas pasar, pada kenyataannya program revitalisasi pasar tradisional tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan

selama ini tidak mengembangkan aspek fisik, ekonomi dan sosial secara bersamaan (Febriantry, 2013:175). Revitalisasi yang dilakukan pemerintah baik pusat atau pun daerah sejauh ini hanya sebatas fisik bangunan pasar, revitalisasi terhadap pengelolaan pasar belum banyak dilakukan.

Salah satu dampak akibat pengelolaan pasar yang kurang optimal dari aspek pedagang yaitu menurunnya pendapatan para pedagang. Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ketut Ayuningsari (2012) yang berjudul “Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar” dengan menggunakan uji beda menunjukkan bahwa pendapatan pedagang setelah program revitalisasi semakin menurun. Peningkatan pengunjung pasar hanya mempercepat lakunya barang dagangan dan tidak meningkatkan pendapatan. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa upaya revitalisasi pasar tradisional sebaiknya tidak hanya terhenti pada pembenahan lingkungan fisik pasar. Sehingga harus dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk memperbaiki segala aspek mulai dari jaringan suplai barang dagangan, akses permodalan, manajemen, penataan dan pengelolaan parkir, hingga pemasaran.

Selain itu penelitian lain oleh Fatimah dan Sujadi dalam Nurhayati (2014) yang berjudul “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional; Studi pada Pasar Nusukan dan Sidodadi” dengan menggunakan analisis kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan pedagang setelah program revitalisasi semakin menurun. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan pedagang tidak



hanya dengan memperbaiki bangunan fisik pasar saja tetapi harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mendukung.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eis Al Masitoh tahun 2013 dari UIN Sunan Kalijaga dengan Judul “Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul”. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul telah membuktikan dukungan kepada pasar tradisional melalui kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya pada fisik bangunan saja, tetapi juga pada pengelolaan pasar tradisional dengan cara-cara yang lebih modern. Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul merupakan salah satu contoh pasar tradisional yang telah direvitalisasi dengan baik oleh Pemkab Bantul. Pasar Piyungan tidak hanya direvitalisasi secara fisik, tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baru dan modern. Terbukti dengan adanya beberapa fasilitas penunjang berupa layanan umum dan program pendampingan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pasar tradisional seharusnya tidaklah sekedar perbaikan pasar dari segi bangunan (fisik) saja. Tetapi perlu didukung dengan perbaikan dari segi pengelolaan (*non fisik*) pasar tradisional secara modern. Gagalnya revitalisasi dalam merubah nasib pedagang pasar tradisional menunjukkan lemahnya manajemen pasar tradisional. Hal tersebut disebabkan karena pengelola pasar belum melaksanakan fungsinya secara optimal dan tidak didukung dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas (Nurhayati, 2014: 49). Pengelolaan pasar yang baik dan profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional,

meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang memiliki kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional tercantum dalam Panca Program Bupati Wonogiri. Panca Program tersebut memberikan skala prioritas bidang pembangunan yang diharapkan mampu menyentuh sendi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Program pemberdayaan pasar tradisional sebagai salah satu prioritas pembangunan berfokus pada kegiatan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Salah satu usaha percepatan pembangunan adalah dengan cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ekonomi Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,24% sedangkan pada tahun 2015 menjadi 5,34% (Tabel 1). Selain itu selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) struktur perekonomian Wonogiri didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu: sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa. Porsi sektor jasa-jasa bersama dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran tiap tahun cenderung meningkat, sedangkan sektor industri pengolahan cenderung tetap atau bahkan menurun. Demikian pula kontribusi sektor pertanian tiap tahun mengalami penurunan. (*Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Wonogiri tahun 2016*).



**Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
<b>2011</b>	2,24
<b>2012</b>	5,89
<b>2013</b>	4,36
<b>2014</b>	5,26
<b>2015</b>	5,34

*Sumber: PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 (BPS)*

Jika dilihat dari data diatas maka sektor perdagangan di Kabupaten Wonogiri cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat perdagangan yang berkembang di Kabupaten Wonogiri. Pasar tradisional yang berada di Kabupaten Wonogiri turut berperan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang berasal dari pasar dan parkir.

Kabupaten Wonogiri seperti yang terdapat dalam laporan Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2017 terdiri dari 25 kecamatan, 251 desa dan 43 kelurahan. Berdasarkan data tersebut menjadikan keberadaan pasar tradisional tersebar di seluruh kecamatan dan sebagian desa atau kelurahan telah memiliki pasar desa. Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi tiga (3) yaitu: pasar umum, pasar desa dan pasar hewan. Tabel berikut menjelaskan jenis pasar dan jumlahnya yang diperinci menurut tahun.

**Tabel 1.2 Jenis Pasar dan Jumlah di Kabupaten Wonogiri**

No	Jenis Pasar	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pasar umum	28	28	26	26	26
2	Pasar desa	68	68	68	68	68
3	Pasar hewan	9	9	9	9	9
	Jumlah:	105	105	103	103	103

Sumber: Retnaningsih dan Teguh Suprpto (2016:37)

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa untuk pasar umum atau pasar di tingkat kecamatan telah ada disemua kecamatan sedangkan untuk pasar desa dari jumlah 294 desa dan kelurahan baru terdapat 68 pasar desa sedangkan untuk pasar hewan baru terdapat 9 tempat saja.

Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri memberikan target utama yaitu Revitalisasi Pasar Tradisional Baturetno I. Pasar Tradisional Baturetno I terletak di kecamatan Baturetno yang berbatasan langsung dengan kecamatan Nguntoronadi disebelah utara, kecamatan Giriwoyo disebelah selatan, kecamatan Eromoko disebelah barat dan kecamatan Batuwarno disebelah timur. Pasar Tradisional Baturetno I berlokasi tepat di pinggir jalan serta dekat dengan kecamatan-kecamatan lain. Hal tersebut menjadikan Pasar Tradisional Baturetno I sebagai pasar yang memiliki perputaran ekonomi yang tinggi di Kabupaten Wonogiri. Selain itu hasil retribusi Pasar Tradisional Baturetno I dalam sehari sekitar Rp. 500.000,00 dan belum ditambah retribusi parkir. (*Laporan Buku Kas Pasar Kabupaten Wonogiri di Baturetno, 2017*).

Kondisi Pasar Tradisional Baturetno I seperti pasar tradisional lainnya, yaitu kurang layak dan terkesan kumuh. Pasar Tradisional Baturetno I terakhir dilakukan perbaikan sekitar tahun 1970an dan walaupun ada perbaikan atau renovasi sifatnya hanya tambal sulam (Retnaningsih dan Teguh, 2016:38). Disisi lain Pasar Tradisional Baturetno I merupakan simpul pergerakan barang hasil pertanian dan komoditas lain dari kecamatan-kecamatan atau wilayah lain disekitarnya.

Revitalisasi Pasar Tradisional Baturetno I telah dilakukan sejak bulan Mei 2017. Sehingga selama pembangunan pasar para pedagang menempati pasar darurat sementara yang terletak kurang lebih 100 meter dari lokasi Pasar Tradisional Baturetno I. Penempatan pedagang di pasar darurat tidak melalui proses pengundian. Pedagang ditempatkan sesuai nomor atau urutan semula seperti di pasar lama.



**Gambar 1.3 Kondisi Pasar Darurat Baturetno I**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Baturetno I (J) menjelaskan bahwa:

“Pasar darurat ini dibangun diatas tanah lapangan Desa Baturetno dengan sistem sewa lahan. Kami menyediakan 1.174 tempat untuk pedagang yang terdaftar dan pedagang yang datang. Pembangunan pasar Baturetno ini sudah 93% selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai semua pedagang di pasar darurat ini akan pindah kesana. Itu kan dibangun dua lantai (pasar), kami sudah ada rencana tentang pembagiannya, nanti di lantai I ditempati kios dan los pakaian, kain, penjahit, toko kelontong, tukang cukur, buah, sepatu sandal dan *bolo* pecah. Lantai II nanti dibuat zonasi untuk los daging, warung makan, los *bumbon*, grabatan, sayuran, kios ikan kering, hasil bumi, los campuran dan los tahu tempe dan sebagainya mbak. Nanti ada tempat untuk bongkar muat barang di lantai II juga. Iya, nanti kalau untuk pengelolaan tentu ada yang beda.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jumaidi selaku Kepala Pasar Baturetno I pada tanggal 2 Desember 2017 jam 11.30 WIB di ruang Kantor Pasar Baturetno I).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan Pasar Tradisional Baturetno I hampir selesai. Seperti yang terpapar dalam Skema Rencana Proyek Revitalisasi Pasar Baturetno I pasar baru Baturetno I dibangun 2 (dua) lantai dengan kurang lebih 133 kios dan 1.492 los didalamnya. Kios dan los itu sendiri diperuntukkan bagi pedagang yang selama ini sudah memiliki Kartu Tanda Pedagang (KTP).



**Gambar 1.4 Revitalisasi Fisik Pasar Traisional Baturetno I**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Berangkat dari permasalahan yang terjadi, terdapat kegagalan dalam meningkatkan pendapatan pedagang atau mengenai sepiunya jumlah pengunjung pasca revitalisasi. Revitalisasi pasar tradisional selama ini lebih ditekankan pada aspek fisik. Selain itu banyak pasar tradisional yang tutup bukan disebabkan oleh sumber daya (*man, money, material, machines, methods, marketing, minutes* dan informasi) tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan pengelolaannya. (*Urban Sector Development Reform Project*, II-1, 2013). Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi apabila tidak dilakukan dengan baik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Ketidakjelasan pengelolaan pasar akan menciptakan kesemerawutan kondisi pasar. Sehingga akan sulit menghilangkan citra negatif yang telah melekat pada pasar tradisional.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendorong profesionalisasi pengelolaan aset pasar, maka perlu dilakukan reformasi pengelolaan pasar pasca revitalisasi secara profesional dan modern. Reformasi sendiri memiliki arti yaitu suatu proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2009: 67). Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Salah satu bentuk strategi reformasi pengelolaan pasar yaitu melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*). Menurut Milen (2006, 16) mengungkapkan bahwa *capacity building* merupakan proses dalam meningkatkan



kinerja sektor publik yang dilakukan oleh individu, organisasi atau institusi untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus (berkelanjutan). Terdapat prinsip-prinsip dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) menurut Milen (2006: 36) yang meliputi, proses yang berkelanjutan, keterlibatan semua pihak, keterlibatan *stakeholders* dan dilakukan secara bertahap. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) erat hubungannya dengan *good governance*. Hal tersebut karena semua dimensi *capacity building* yang ada dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat dalam *good governance*.

Untuk merumuskan strategi pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi maka diperlukan gambaran mengenai pengelolaan pasar selama ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan pasar telah dilakukan secara profesional dan modern. Pengelolaan pasar secara modern melibatkan berbagai pihak dan *stakeholders*. Sehingga dapat diketahui secara jelas fungsi dan tugas dari masing-masing *stakeholders*. Misalnya, pengelolaan keamanan pasar diserahkan kepada pihak desa atau anggota Paguyupan Pedagang Pasar Baturetno (P3B). Sistem penarikan retribusi yang telah terjadwal dengan jam operasional yang tetap. Serta pengelolaan sarana dan prasarana dan kebersihan pasar yang melibatkan pedagang dan pengunjung pasar.

Terlibatnya berbagai *stakeholders* dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar merupakan prinsip dari *good governance*. Pengelolaan pasar yang menggunakan prinsip *good governance* dengan pendekatan *capacity bulding* berarti melakukan pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*).

Disamping itu, *capacity building* merupakan suatu proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*). Hal tersebut dilakukan dengan cara pemberian kualitas pelayanan secara lebih baik, efektif dan efisien dengan pengelolaan pasar yang terintegrasi.

Dengan adanya reformasi pengelolaan pasar secara profesional dan modern diharapkan mampu meningkatkan pendapatan retribusi. Meningkatnya retribusi tersebut terjadi apabila pengelolaan pasar sudah berjalan secara efektif dan efisien sehingga pengunjung akan menyukai berbelanja di pasar tradisional. Selain itu, agar mampu meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar dengan menciptakan rasa aman dan nyaman serta untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja kritik yang dihadapi dalam pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I?
3. Bagaimana strategi pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam perspektif *capacity building*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menggambarkan pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi yang telah dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai kritik dalam pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I.
3. Untuk merekomendasikan strategi pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi yang dapat dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri dalam perspektif *capacity bulding*.

### D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
  - a) Bagi Mahasiswa
    - 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
    - 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.



b) Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengelolaan pasar pasca revitalisasi khususnya pada revitalisasi pasar tradisional di Pasar Baturetno I oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai pengelolaan pasar tradisional di Pasar Baturetno I oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, dan disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan

sebagai penutupnya yaitu menguraikan tentang sistematis penulisan ini.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang teori-teori, kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mencakup materi yang terdiri dari jenis penelitian, faktor penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian serta analisa dan interpretasi data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan (Sjamsuddin, 2012:113). Pengertian administrasi publik pertama kali disampaikan oleh Woodrow Wilson dalam Priyono dan Mandala (2010:111) yaitu, “...as the detailed and systems of public law...”. Berdasarkan definisi tersebut, administrasi publik adalah proses operasionalisasi keputusan politik. Dengan demikian Wilson memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi.

Selanjutnya menurut Fesler dalam Keban (2014:5) administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Pendapat ahli lain, Zauhar (1996:31) mengutip pendapat Nigro dan Nigro (1980) yang mendefinisikan administrasi publik sebagai:

- (1) Usaha kerjasama kelompok di dalam suatu organisasi publik;
- (2) Mencakup 3 (tiga) buah badan/ lembaga (eksekutif, legislative dan yudikatif) serta interrelasi di antara ketiganya;
- (3) Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik;

- (4) Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat; dan
- (5) Mempunyai ikatan yang erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Definisi pertama dari Nigro dan Nigro (1980) tersebut yaitu:

“Kerja sama yang dimaksud dalam administrasi publik adalah kerja sama yang ada di dalam organisasi publik bukan organisasi lain. Selain itu yang perlu mendapat perhatian di sini adalah konsep organisasi publik. Organisasi publik berbeda dengan organisasi pemerintah. Organisasi publik meliputi semua organisasi sosial yang menjalankan kebijaksanaan publik dan hukum publik. Dengan rumusan berikut maka organisasi publik terwujud dalam pemerintah daerah. Definisi kedua mengartikan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan cabang eksekutif saja, akan tetapi berkaitan juga dengan legislatif dan yudikatif. Dalam butir ketiga merupakan bagian dari proses politik. Ini berarti Nigro dan Nigro menolak paham dikotomi politik dan administrasi, mereka yakin bahwa di antara keduanya sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Butir keempat menyatakan bahwa administrasi publik sangat berbeda dengan administrasi privat. Walaupun keduanya merupakan satu genus yang disebut administrasi, namun beroperasinya pada bidang yang berbeda, di samping mempunyai kesamaan, keduanya mempunyai banyak perbedaan. Butir terakhir dari definisi Nigro dan Nigro berkaitan erat dengan sifat *publicness* dari administrasi publik. Segala daya dan dana yang dimiliki oleh administrasi publik ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian administrasi publik tidak dipandang sebagai administrasinya publik, melainkan dengan administrasi untuk publik (Zauhar, 1996:31-33).

Dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara melalui suatu organisasi publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan serta dalam memenuhi kebutuhan publik (masyarakat)

malalui kebijakan-kebijakan demi tercapainya tujuan Negara secara efektif dan efisien.

## **2. Fungsi Administrasi Publik**

Menurut Tjokroamidjojo dalam Tjiptoherijanto dan Mandala (2010:112) 3 (tiga) fungsi utama dalam administrasi publik, yaitu:

### **a) Formulasi/ Perumusan Kebijakan**

Fungsi formulasi kebijakan memiliki 4 (empat) sub fungsi, yaitu analisis kebijakan, prakiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsisten tersebut mencakup konsisten antar waktu atau generasi, antar sector dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan.

### **b) Pengaturan/ Pengendalian Unsur-unsur Administrasi**

Unsur-unsur administrasi yang harus dikelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen tersebut. Pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain yaitu pengelolaan internal administrasi publik atau dengan kata lain sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Meningkatnya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas rutin dan kemampuan merespon perkembangan eksternal yang

mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan perkembangan-perkembangan internasional.

c) Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Apabila pengaturan/ pengendalian unsure-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Dari pemaparan fungsi-fungsi diatas, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan suatu pembangunan pemerintah memiliki suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan negara. Proses-proses tersebut terdiri dari tahap awal yaitu formulasi, pengaturan dan penggunaan dinamika administrasi. Dari keseluruhan proses tersebut diharapkan dapat mewujudkan kelancaran dalam proses pembangunan dan dapat memberikan manfaat kepada publik (masyarakat).

### 3. Paradigma Administrasi Publik

Berikut terdapat beberapa perkembangan paradigma ilmu administrasi publik, dalam salah satu karya klasiknya : “*Public Administration and Public Affairs*”, Henry (1998) dalam Islamy (2009:3) mengungkapkan adanya dan timbul-tenggelamnya paradigma ilmu administrasi publik dari kurun waktu 1990 an- 1970 an. Penjelasan secara singkatnya, antara lain:

a) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

J. Goodnow dalam bukunya yang berjudul “*Politics and Administration*”, dalam Islamy (2003:10) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi utama pemerintah yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan fungsi perumusan kebijakan-kebijakan dan pengekspresian kehendak/ keinginan negara, sedangkan fungsi administrasi ada kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dan kehendak negara tersebut. Pemisahan kekuasaan tersebut menjadi basis utama pembeda keduanya, dimana badan legislatif dibantu yudikatif bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut secara imparsial dan apolitis. Berdasarkan perbedaan kedudukan inilah kemudian oleh para ilmuwan dikenal dengan dikotomi antara politik (perumus kebijakan) dan administrasi (pelaksana kebijakan). Paradigma ini lebih menekankan pada lokusnya, yaitu bahwa administrasi publik berpusat pada birokrasi pemerintahan (*government bureaucracy*). Sedangkan fokusnya terbatas pada masalah-masalah organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan yang merupakan isi dari ilmu politik.

b) Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Pada masa ini administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, bidang-bidang tersebut yang membawa dampak besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi yang dikenal sebagai *The Principles of (Public)*



*Administration*. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi fokus kajian administrasi publik. Sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena adanya esensi prinsip-prinsip tersebut. Pada era ini lahir pula 7 prinsip administrasi (POSDCORB) yang dikemukakan oleh Gullick dan Urwick, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*.

c) Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini lahir karena munculnya ketidakpuasan terhadap pemisahan antara politik dan administrasi serta keyakinan yang kuat bahwa politik dan administrasi adalah satu. Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi kembali menemui induk ilumya yaitu ilmu politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaharuan pada lokusnya yaitu pemerintahan.

d) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Sekitar tahun 1960 an muncul masalah baru yaitu tentang garis yang memisahkan antara administrasi publik dengan administrasi bisnis, selain itu mengenai pengertian “*public*” dalam “*public administration*”. Maka dari itu dalam paradigme 4 ini masih belum bisa dipecahkan masalah lokus administrasi publik, sehingga administrasi publik perlu mencari paradigma baru yang dapat menemukan baik fokus maupun lokusnya.

- e) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Pada perkembangan ini administrasi publik lebih berfokus pada ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (*Policy Science*) dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi publik dengan lokusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, *public policy* dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya yaitu pada kepentingan publik dan persoalan-persoalan masyarakat (*Public Affairs*). Di dalam *policy science* tersebut tercakup politik perumusan kebijaksanaan, teknik analisis, kebijaksanaan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan (Islamy, 2009:3).

Lebih lanjut Dendhardt dan Dendhardt (2007) dalam Wijaya dan Danar (2014:7-12) membagi paradigma ilmu administrasi publik menjadi 3 (tiga) kelompok besar, berikut penjelasannya:

- a) *The Old Public Administration* (OPA)

Paradigma OPA merupakan administrasi publik lama dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Fokus utama ialah bagaimana agar dapat menyediakan pelayanan publik melalui organisasi pemerintahan.
- (2) Kebijakan publik dan administrasi publik dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara yang baik.

- (3) Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan yang mempunyai tugas untuk bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik.
- (4) Pelayanan publik diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dengan diskresi terbatas.
- (5) Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik yang telah terpilih secara demokratis.
- (6) Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi.
- (7) Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik yaitu efisiensi dan rasionalitas.
- (8) Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga Negara dibatasi.
- (9) Peranan administrator publik yaitu melaksanakan prinsip-prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

b) *The New Public Management* (NPM)

Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam

sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintahan kepada sektor swasta.

c) *The New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* (NPS) menentang paradigma *New Public Management* (NPM). NPS lebih menekankan pada pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik bukan hanya mengarahkan. Terdapat beberapa prinsip dalam NPS, yaitu:

- (1) Melayanai masyarakat bukan pelanggan; Kepentingan publik adalah hasil dari dialog mengenai transfer nilai daripada agresi kepentingan individu. Oleh karena itu pelayan publik tidak hanya merespon kebutuhan pelanggan, tetapi lebih fokus kepada membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara aktor.
- (2) Mengutamakan kepentingan umum; Administrator publik harus berkontribusi untuk membangun kepentingan dan nilai bersama dengan tujuan agar bisa mendapat solusi yang tidak hanya ditentukan oleh pihak individual.
- (3) Nilai kemasyarakatan/ kewarganegaraan diatas kewirausahaan; Kepentingan publik dilaksanakan oleh pelayan publik dan masyarakat yang membuat komitmen untuk berkontribusi

terhadap kepentingan publik bukan dengan menjadi manajer publik yang memiliki nilai kewirausahaan.

(4) Berfikir strategis, bertindak demokratis; Kebijakan dan program akan dapat memenuhi kebutuhan publik dengan lebih efektif dan bertanggungjawab melalui usaha dan proses secara kolektif dan kolaboratif.

(5) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan perkara yang mudah; Pelayan publik harus lebih jeli daripada pasar, mereka juga harus memperhatikan aturan dan hukum konstitusi, nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan masyarakat.

(6) Melayanai daripada mengarahkan; Menggunakan kepemimpinan berbasis nilai (*value-base leadership*) untuk membantu masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka daripada berusaha untuk mengontrol atau mengarahkan masyarakat.

(7) Nilai dari orang, bukan hanya produktivitas; Organisasi publik dan jaringannya berpartisipasi agar sukses dalam jangka panjang untuk menjalankan pemerintahan melalui kolaborasi dan kepemimpinan berdasarkan penghormatan terhadap seluruh masyarakat.

Meskipun secara garis besar hanya ada 3 paradigma besar dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa

*governance* merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Dibalik semua urutan paradigma tersebut, “*Governance*” atau sekarang lebih dikenal dengan “*Good Governance*” bisa dikatakan menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. *Governance* merujuk pada sebuah proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan tersebut dilaksanakan yang melibatkan baik Negara (pemerintah), *private sector* maupun masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. *Governance* melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga *private sector* dan masyarakat madani. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan (Kurnia, 2014:319).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi publik selalu berkembang, hal itu tentunya seiring dengan tuntutan dan kebutuhan dalam mencapai tujuan bersama. Paradigma tersebut dimulai dari *Old Public Administration*, berkembang menjadi *New Public Management* dan lahir paradigma *New Public Service*. Selain itu muncul paradigma baru yaitu *Good Governance* yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan beberapa aktor. Perkembangan paradigma tersebut terjadi karena adanya perbaikan-perbaikan dari setiap paradigma agar sesuai dengan lingkungannya.

## **B. Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang

direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam segala aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih, 2014:18). Dalam artian lain menurut Siagian dalam Hakim (2011:38) administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Selain itu administrasi pembangunan juga diartikan sebagai proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan mencapai objek pembangunan (Edward Weidner dalam Syafi'ie, 2002:149). Siagian dalam Syafi'ie (2002:149) juga menjelaskan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Karakteristik administrasi pembangunan yang diharapkan adalah mampu mendukung dan mengelola proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Pada tabel 2 akan dijelaskan karakteristik yang diharapkan dari administrasi pembangunan.



**Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan**

Administrasi Publik	Administrasi Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju.</li> <li>2. Dalam ilmu administrasi negara terdapat kelompok cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijakan, tetapi peran tersebut masih kurang ditekankan. Bahkan ada yang menyebut administrasi negara bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan/ masyarakat.</li> <li>3. Lebih menekankan pada pelaksanaan yang tertib/ efisien dari unit-unit kegiatan pemerintahan pada waktu kini, atau berorientasi masa kini.</li> <li>4. Lebih ditekankan pada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (<i>public service</i>) dan tertib pemerintahan (<i>law and order</i>). Administrasi negara lebih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih memberi perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.</li> <li>2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (<i>committed</i>) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijakannya melalui proses politik.</li> <li>3. Berorientasi kepada usaha yang mendorong perubahan-perubahan sosial (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan, atau berorientasi masa depan.</li> <li>4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (<i>development function</i>) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan</li> </ol>

<p>bersikap sebagai <i>balancing agent</i>.</p>	<p>terdahulu. Juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrument-instrumen bagi pencapaian tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai <i>development agent</i>.</p>
<p>5. Administrasi negara lebih menengok pada kerapian aparatur administrasi itu sendiri.</p>	<p>5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. (Program-program pembangunan).</p>
<p>6. Dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrator dalam aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana.</p>	<p>6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (<i>change agent</i>).</p>
<p>7. Berdasarkan legalistik (<i>legalistic approach</i>)</p>	<p>7. Berpendekatan lingkungan (<i>ecological approach</i>), berorientasi pada kegiatan (<i>action oriented</i>) dan bersifat pemecahan masalah (<i>problem solving</i>)</p>

**Sumber: Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:12)**

Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara.

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun, administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertian umum, seperti memelihara

keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.

Lahirnya administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Islamy (2003:9) setidaknya dipicu oleh 4 hal, yaitu:

- a) Banyaknya perhatian para sarjana administrasi publik terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan termasuk di dalamnya proses perumusan kebijakan pembangunan dan instrument pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- b) Semakin maraknya penerapan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) pada administrasi publik, yang cenderung mengkaji sikap dan perilaku birokrasi serta berbagai masalah hubungan kemanusiaan di dalamnya;
- c) Berkembangnya pendekatan ilmu manajemen dalam administrasi publik, seperti pendekatan analisis sistem, riset operasi, sistem perencanaan pemrograman penganggaran, penggunaan teknik kuantitatif, dan sebagainya;
- d) Puncak pengembangan studi komparatif ilmu administrasi publik yang lebih banyak menyoroti pengaruh aspek ekologi sosial dan budaya lokal terhadap administrasi negara.

Maka pada hakekatnya administrasi pembangunan adalah semua usaha atau proses yang mendukung pembangunan untuk mendorong adanya perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Usaha tersebut melalui kebijakan dalam proses politik di segala bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

### C. Reformasi Administrasi

Penggunaan istilah reformasi administrasi menunjukkan atau mengacu pada perbaikan administrasi, begitupun halnya Sumartono (2007:7) menyatakan bahwa:

“reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur

birokrasi (aspek kelembagaan) serta sikap dan perilaku aparat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga tercipta administrasi berkenaan dengan tiga gal sebagai poin utama, yaitu reformasi struktur dan prosedur birokrasi, sikap dan perilaku aparat serta kultur birokrasi dalam pelayanan publik”

Selain itu definisi tentang reformasi administrasi juga dikemukakan oleh Zauhar (2007:11) reformasi administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah (a) struktur dan prosedur birokrasi (aspek keorganisasian atau kelembagaan); b) sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin terciptanya pembangunan nasional. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Caiden dalam Zauhar (2007:6) yaitu reformasi administrasi didefinisikan sebagai *An Artificial Inducement of Administrative Transformation Against Resistance*, dimana diartikan sebagai dorongan untuk membuat perubahan administrative dalam menghadapi tantangan. Dorongan untuk membuat perubahan administrative dalam klausul ini memberikan suatu pemahaman bahwa perubahan administratif itu dapat dilakukan apabila berangkat dari suatu niat sadar dan sengaja. Jika perubahan itu dilandasi oleh nalar yang sadar dan sengaja, maka jelas bahwa perubahan itu terjadi dalam proses yang terencana.

Pengertian reformasi administrasi menurut Zauhar (2007:6), lebih rinci memetakan dalam 3 (tiga) implikasi, yakni (a) reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia, tidak bersifat

eksidental, otomatis maupun ilmiah; (b) reformasi administrasi merupakan suatu proses; (c) resistensi beriringan dengan reformasi administrasi. Di samping itu Sumartono (2007:172) melihat pandangan Caiden lebih kepada sasaran reformasi administrasi harus diarahkan *to improve the administrative performance of individuals, group, and institutional and to advise them how they can achieve their operating goals more effectively, more economically and more quickly*, yang berarti untuk memperbaiki kinerja administrative individu-individu, kelompok, dan institusi serta menuntut bagaimana mereka dapat mencapai tujuan-tujuan kegiatan mereka dengan lebih efektif, lebih ekonomis dan lebih cepat.

#### **D. Good Governance**

##### **1. Governance (Kepemerintahan)**

*Governance* adalah salah satu paradigma dari administrasi publik (Cheema 2007:20). Beda utama dari pemerintah (*government*) dengan tata pemerintahan (*governance*) adalah pada istilah pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan aktor yang mengemban fungsi memerintah dan fungsi mengelola administrasi sebuah pemerintahan. Contohnya, di tingkat desa konsep pemerintah (*government*) merujuk kepada kepala desa beserta perangkat desa. Hal ini berbeda dengan tata pemerintahan (*governance*) yang lebih menggambarkan pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Misalnya di tingkat desa, konsep tata pemerintahan merujuk pada pola hubungan antar pemerintah desa, kelembagaan politik,

kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial guna menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan.

Menurut pendapat ahli, Sedarmayanti (2004:2) menjelaskan bahwa:

“Pemerintah (*government*) dalam bahas Inggris diartikan sebagai: “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” (*governance*) yaitu “Tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”.

Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan/ proses, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kooiman (1993) dalam Sedarmayanti (2004:2) bahwa “*Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi-interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997), dalam Sedarmayanti (2004:34) mendefinisikan “*Governance*” sebagai berikut:

“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”

Dalam Sedarmayanti (2004: 36-37), *governance* menurut UNDP mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan



kekuasaan/ kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Hubungan antara *government* dengan *Governance* dapat diibaratkan hubungan antara rumput dan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi jika kita menanam padi, maka rumput akan dengan sendirinya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya padi. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintahan (*government*) yang baik, maka tata pemerintahan (*governance*) yang baik tidak akan tumbuh. Namun sebaliknya, pemerintah (*government*) yang baik akan muncul bersamaan jika kita menciptakan tata pemerintahan (*government*) yang baik.

## 2. *Good Governance*

Terkadang kata *Good Governance* sering diucapkan pada berbagai peristiwa oleh berbagai kalangan, namun pengertian *Good Governance* bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian kalangan mengartikan *Good Governance* sebagai kinerja sebuah lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang telah memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu.

Menurut Indradi (2009:23) secara konseptual kata baik (*good*) dalam istilah *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu:

- 1) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yakni kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- 2) Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat banyak pengertian mengenai *Good Governance* yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinisikan oleh *World Bank* dalam “*World Development Report*” (Admin, 2002), yaitu sebagai berikut:

“*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti (2004:4) yang menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat. Sedarmayanti (2004:4) juga merumuskan arti *Good Governance* sebagai pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sinambela (2006:47) menjelaskan pula secara teoritis bahwa *Good Governance* dapat dimaknai sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh

upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan. Selain itu juga, *Good Governance* juga banyak diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dan amanah, dimana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (*stakeholders*). Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui saluran-saluran kelembagaan yang resmi ataupun secara informal.

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ada kerja sama dari berbagai *stakeholders*. Selain itu, kunci utama untuk dapat memahami *Good Governance* adalah dengan memahami atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Sehingga apabila prinsip-prinsip yang ada dapat diterapkan dengan baik maka akan mewujudkan *Good Governance*.

### 3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Tjokroamidjodo dalam Sinambela (2006:48), dijelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pemimpin suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban
- b. Transparansi (*Transparency*) adalah dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan usaha.
- c. Keterbukaan (*Openness*) adalah pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.

- d. Berdasarkan hukum (*rule of law*) keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- e. Jaminan *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/ perlakuan kesetaraan) ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.

Sedangkan, untuk standarisasi pelaksanaan *Good Governance* di

seluruh negara di dunia, UNDP (dalam EROPA, 2000) memberikan persyaratan berupa sepuluh prinsip dalam penyelenggaraan *Good Governance*. Berikut sepuluh prinsip UNDP dalam penyelenggaraan *Good Governance*:

- a. Partisipasi  
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Penegakan Hukum  
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Transparansi  
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Kesetaraan  
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan .
- e. Daya Tanggap  
Meningkatkan kepekaan terhadap penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- f. Wawasan ke Depan  
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- g. Akuntabilitas  
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- h. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.

i. Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

j. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam *Good Governance* memiliki prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Oleh karena itu, apabila teori dengan prinsip-prinsip *Good Governance* telah dipahami dengan baik, maka akan mempermudah terciptanya tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang ada.

## **E. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)**

### **1. Pengertian Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Dalam beberapa literatur pembangunan, konsep *capacity building* sebenarnya terdapat variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya dalam pendefinisian. Menurut Milen (2006:12) kapasitas (*capacity*) adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Selain itu pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas (*capacity building*) menurut Milen (2006:16) bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi

satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).

Sebagian ilmuwan memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*). Namun keduanya memiliki karakteristik yang sama yakni analisis kapasitas sebagai inisiatif lain untuk meningkatkan *government performance*. Dalam hal ini searah dengan pendapat Grindle (1997:6-22) *capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*. (Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah. Yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resource*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepuasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana mensinkronkan antara keutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut) (Soeprpto, 2007:8-9).

Sebagai program yang banyak berhubungan dengan proyek pembangunan negara Dunia Ketiga, *capacity building* telah menjadi



bagian pembahasan dalam lembaga internasional; *United Nations* memberi rujukan *capacity building* yang berdimensikan pada; 1) mandat dan struktur legal, 2) struktur kelembagaan, 3) pendekatan manajerial, 4) kemampuan organisasional dan teknis, 4) kemampuan fiskal lokal, dan 5) aktivitas-aktivitas program. *World Bank* menekankan perhatian *capacity building* pada;

- a) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis;
- b) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen;
- c) Jaringan kerja (*network*), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal;
- d) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (*rule*) dan undang-undang (*legislation*) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi *development tasks* serta dukungan keuangan dan anggaran;
- e) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang memengaruhi kinerja.

Sedangkan UNDP (*United Nations Development Program*) memfokuskan *capacity building* pada tiga dimensi, yaitu;

- a) Tenaga kerja (dimensi *human resources*), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan;
- b) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung;
- c) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.

Pengembangan kapasitas dalam praktik meliputi tahap-tahap; penilaian kelonggaran kapasitas, merancang strategi-strategi, dan mengimplemaentasikan tindakan-tindakan serta monitoring dan evaluasi. Proses tersebut sangat berkaitan erat dan tidak boleh dilakukan secara

bersamaan dan harus membentuk proses yang berkelanjutan. Semua tahap tersebut mengandung elemen-elemen yang sama dalam mengerjakan kemitraan, menggunakan cara pemikiran yang terintegrasi dan holistik, mengadopsi pendekatan proses dan menggunakan perspektif jangka panjang (Milen, 2006:35).

## **2. Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Menurut Milen (2006:36) terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*), antara lain:

### **a) Proses yang berkelanjutan**

Penilaian kapasitas adalah dasar untuk merencanakan strategi. Layaknya strategi yang harus dibuat fleksibel, penilaian kapasitaspun harus menyertai proses tersebut, mendukung pengambilan keputusan, meninjau kembali serta merancang kembali, bukan sekedar acara yang dikendalikan oleh pihak dari luar. Ia harus memperhatikan kebijakan yang ditentukan atau tujuan maupun visi program; berkaitan dengan hal-hal tersebut, menilai atau mengukur kapasitas adalah hal yang sangat diperlukan. Penilaian itu dilakukan dengan berbagai cara menurut tujuan dan visi program tersebut.

### **b) Keterlibatan semua pihak (tingkat)**

Aktivitas kapasitas difokuskan pada individu, tim, organisasi atau sistem, dan harus meliputi tingkatan-tingkatan lain. Disisi lain, untuk menghasilkan kinerja yang baik maka perlu dilakukan pengujian terhadap

faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam suatu organisasi kepada seluruh tingkatan (dimulai dari tingkat atas sampai tingkat terendah). Analisa kapasitas tersebut diperlukan untuk mencari penyebab kinerja yang buruk dan/atau memastikan bahwa program atau sistem baru kapasitas lain yang berpotensi menghasilkan kinerja yang baik.

c) Keterlibatan *stakeholders*

Sebagaimana dalam keseluruhan proses penguatan kapasitas, juga dalam identifikasi kesenjangan kapasitas, semua *stakeholders* perlu dilibatkan. Analisa *stakeholders* dapat dilakukan untuk menentukan siapa yang harus terlibat, peran-perannya, akuntabilitas, tanggung jawab, dan besarnya keterlibatan.

d) Dilakukan secara bertahap

Penilaian kapasitas biasanya perlu dilakukan secara bertahap karena dasar dan hal-hal dari proses tersebut tergantung pada tahap organisasi atau sistem saat ini. Sebagai contoh sebuah organisasi kurang dalam hal kapasitas manajemen inti yang strategis (visi, misi dan strategi) akan lebih memerlukan pendekatan yang agak berbeda dalam hal penilaian kapasitas dibandingkan dengan organisasi dengan kapasitas manajemen yang baik. Terdapat dua perspektif, pertama, penilaian awal dari kapasitas masa depan yang disyaratkan serta penilaian kapasitas yang ada dari sudut pandang kebutuhan masa yang akan datang. Kedua, konsentrasi dalam menentukan situasi masa depan, dan untuk itu kapasitas di tingkat

individu, organisasi dan sistem harus mampu mengidentifikasi kelonggaran kapasitas dengan lebih tepat.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas** **(Capacity Building)**

Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kelima hal pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a) Komitmen bersama (*Collective commitments*)**

Menurut Milen (2006:17) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan kapasitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *Collective Commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

#### **b) Kepemimpinan yang kondusif (*condusive leadership*)**

Merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi

publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

c) Reformasi peraturan

Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas.

d) Reformasi kelembagaan

Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan

menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pembangunan kapasitas.

e) Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Pembangunan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas. (Soeprapto, 2007:20-22).

## **F. Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Pengertian pasar sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Sedangkan menurut Sukirno (2003:25) pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Selanjutnya terdapat 2 (dua) macam



keberadaan pasar, yaitu pasar niskala yang abstrak dimana barang yang diperdagangkan tidak sampai ke pasar dan proses jual beli didasarkan pada contoh barang saja, misalnya bursa tembakau, saham, karet, dan sebagainya. Kedua adalah pasar nyata atau dengan sebutan lain pasar abstrak atau pasar konkrit, adalah pasar yang proses jual belinya terjadi secara langsung dimana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan proses tukar menukar atau jual beli barang dagangan (Narwoko dan Suyatno, 2004:280).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 menyatakan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. Selanjutnya menurut Sukirno (2003:157) memberdakan pasar berdasarkan luas wilayah menjadi berikut: (1) Pasar lokal, adalah tempat diperjual belikan barang kebutuhan pokok oleh penjual dan pembeli di sekitar pasar tersebut. (2) Pasar daerah, adalah tempat pembeli dan penjual memperdagangkan barang yang disalurkan ke daerahnya masing-masing. (3) Pasar nasional, adalah tempat pembeli dan penjual memperdagangkan barang secara partai meliputi daerah dalam suatu negara. (4) Pasar dunia atau internasional, adalah tempat pembeli dan penjual di berbagai negara melakukan perdagangan dengan memakai sistem moneter, misal pasar tembakau di Bremen.

Secara teoritis dalam ekonomi, pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi actual dan potensial

terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Menurut Assauri (2004:75), transaksi potensial ini dapat terlaksana apabila kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

- a) Terdapat paling sedikit dua pihak
- b) Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain.
- c) Masing-masing pihak mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya.
- d) Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak penawaran dari pihak lain.

## **2. Jenis-Jenis Pasar**

### **a. Pasar Tradisional**

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar tradisional, jika dikaji secara jernih, memang memiliki beberapa fungsi penting yang tak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi pasar tradisional: Pertama, pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil. Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang yang bermodal kecil. Ketiga, pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang. Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala local, regional maupun nasional.

#### **b. Pasar Modern**

Pasar Modern banyak berkembang di perkotaan yang ditandai dengan sifat yang impersonal dan harga barang-barang yang dijual ditentukan dengan sistem bandrol. Harga tidak ditentukan atas dasar tawar-menawar antara penjual dan calon pembeli, tetapi harga ditetapkan secara pasti oleh penjualnya. Dalam pasar modern, hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual. Harga yang terjadi bukan

berdasarkan pada interaksi yang erat antara penjual dan calon pembeli. Harga yang terjadi tidak dipengaruhi oleh hubungan sosial antara penjual dan pembeli (Narwoko dan Suyatno, 2004:280).

Pasar modern biasanya merupakan pusat perbelanjaan seperti *plaza, mall, department store* dan sejenisnya yang pengelolaannya dengan menggunakan metode manajemen modern, dan didukung dengan teknologi modern, serta sangat mengutamakan kenyamanan belanja, *space* atau ruangan tempat berjualan disewakan berdasarkan kontrak atau dijual kepada pihak lain sebagai tempat usaha dengan manajemen pengelolaan gedung tetap berada disatu tangan dan bermodal relative kuat. Selain itu keramahan dalam melayani pelanggan menjadi daya tarik serta tingkat kebersihan dan kesehatan lebih terjamin.

### 3. Fungsi Pasar

Sudarmi dan Waluyo (2008:187) mengungkapkan fungsi pasar dalam kegiatan ada tiga macam, yaitu:

#### a. Fungsi Distribusi

Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada perantara lainnya.

#### b. Fungsi Pembentukan Harga

Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua belah pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga, atau disebut harga pasar.

c. Fungsi Promosi

Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan *leaflet* atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya.

Sedangkan Sudarman (1992:16) mengemukakan bahwa pasar memiliki lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat mempunyai tingkat harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Produsen menghasilkan barang yang lebih diinginkan masyarakat akan mendapat keuntungan yang lebih besar.
- b. Pasar mengorganisasi produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih

metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalui mempunyai kemungkinan substitusi. Apabila salah satu faktor produksi mengalami peningkatan harga, maka produsen akan berusaha mencari faktor produksi pengganti. Fungsi pasar ini menunjukkan bagaimana cara menghasilkan barang.

- c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang tergantung dari tingkat pendapatannya. Pendapatan seseorang selain tergantung dari jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tergantung pada harga dari faktor produksi tersebut. Fungsi ketiga ini menjelaskan untuk siapa saja barang tersebut dihasilkan.
- d. Pasar berfungsi sebagai penyelenggara penjatahan. Dalam jangka waktu tertentu jumlah produksi yang tersedia menjadi terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dilakukan penjatahan. Apabila terdapat barang dengan jumlah yang relative sedikit maka tingkat harganya akan relative tinggi dan pada akhirnya akan membatasi tingkat konsumsi.
- e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang. Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar memiliki fungsi yang beragam dan berperan penting bagi kehidupan



masyarakat. Pasar dapat dikatakan sebagai produsen maupun konsumen. Sebagai produsen, pasar digunakan sebagai perantara dalam menjual hasil produksinya selain itu juga digunakan sebagai wadah dalam meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Sebagai konsumen, fungsi utama pasar yaitu mempermudah dalam mendapatkan barang yang diinginkan karena pasar menyediakan kebutuhan manusia.

## **G. Revitalisasi**

### **1. Pengertian Revitalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadikan vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Jadi, pengertian secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi penting dan perlu sekali.

Revitalisasi dalam kaitan ini adalah perbaikan dan pembangunan sarana agar masyarakat merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Maka dari itu fokus utamanya adalah pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten. Sementara itu revitalisasi sangat perlu karena polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

### **2. Revitalisasi Pasar Tradisional**

Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi,

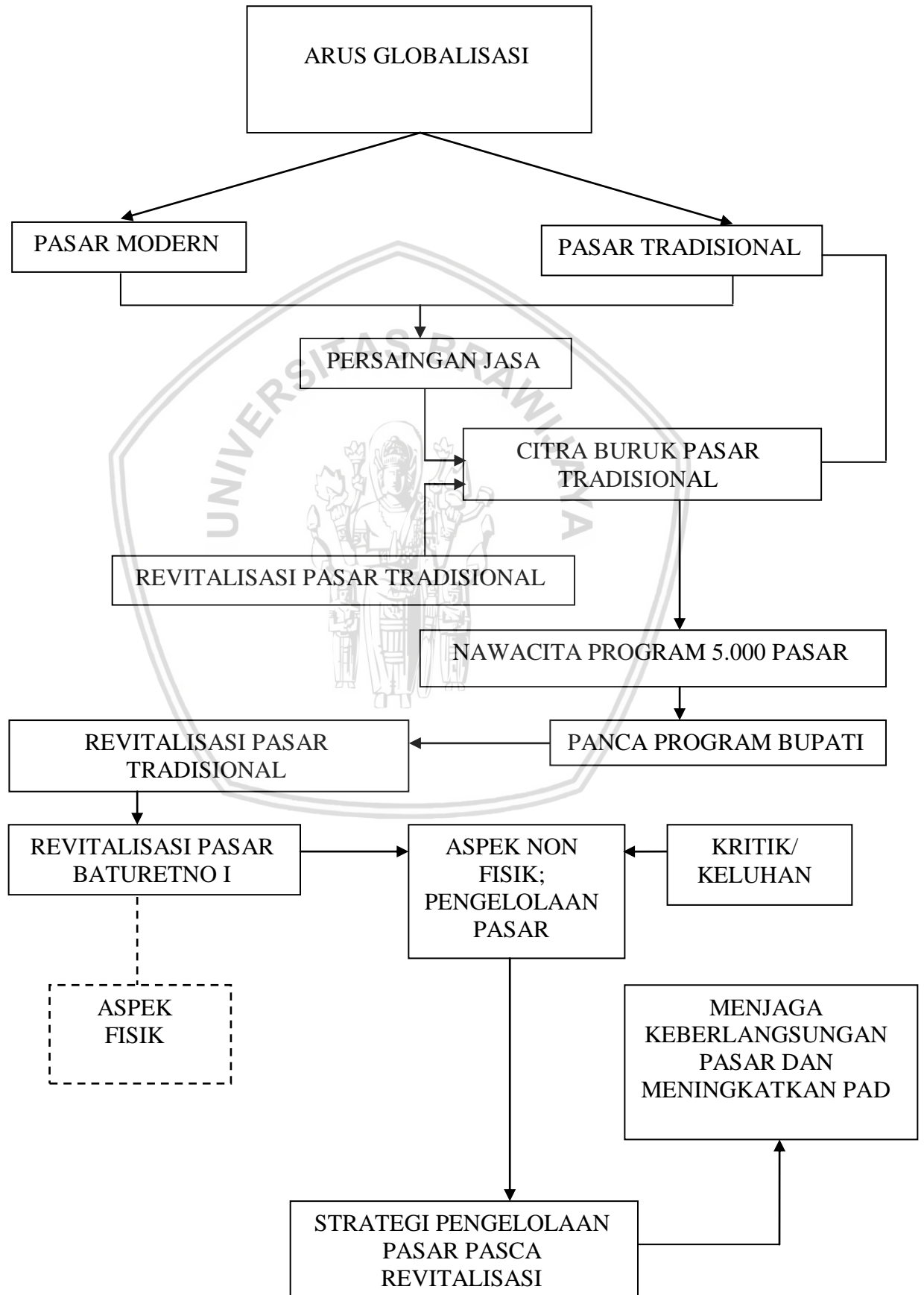
seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama keluarga. Pendekatan yang lebih penting adalah bagaimana mensinergikan pasar tradisional dan perbelanjaan modern, sebagai kesatuan yang fungsional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan pasar modern. Aspek yang diatur melalui Perpres tersebut meliputi definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawasan, dan sanksi. Tentang zonasi pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) yang mengacu terhadap Undang-Undang Tata Ruang.

Revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. Revitalisasi pasar tradisional juga untuk mempertahankan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat. Dalam revitalisasi pasar tradisional perbaikan tidak hanya dilakukan dengan melakukan perbaikan fisik, seperti sarana prasarana penunjang, namun terjadi perbaikan menyeluruh dalam semua aspek pasar termasuk pengelolaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa revitalisasi pasar tradisional mutlak diperlukan, salah satunya adalah perwujudan pembangunan.

Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan berdasarkan prinsip revitalisasi, berikut adalah prinsip dari pelaksanaan revitalisasi pasar menurut kemendag.go.id :

- a) Fisik: Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/ reklame dan ruang terbuka hijau.
- b) Manajemen: mengatur secara jelas aspek-aspek seperti; hak dan kewajiban pedagang; tata cara penempatan dan pembiayaan; fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.
- c) Ekonomi: Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan informal dan formal.
- d) Sosial: Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga sekitar.

## H. Kerangka Pemikiran



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses untuk mendalami suatu fenomena berdasarkan teori tertentu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Abercrombie, Hill, Turner dalam Moleong (2005:54) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang ingin memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kualifikasi atau gejala-gejala yang tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat atau kuantitatif. Penjelasan lebih lanjut (Moleong, 2005:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian deskriptif menurut Arikunto dalam Alfianita (2015:50) adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian dengan metode deskriptif ini

bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dari objek yang akan diteliti. Tipe ini juga berguna untuk menggambarkan realitas tanpa menjelaskan hubungan antar variabel (Lincoln dan Guba dalam Moleong, (2005:04).

Berdasarkan uraian diatas maka alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini yaitu bahwa dalam penelitian ini akan memaparkan tentang pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif seperti yang telah diuraikan diatas, maka yang akan peneliti lakukan disini yaitu menggambarkan keadaan organisasi/lembaga dengan apa adanya atau mengungkapkan fakta dengan apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk sistem penulisan yang sistematis. Selanjutnya peneliti juga akan memaparkan beberapa strategi pengelolaan pasar tradisional yang dapat diterapkan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri dalam mengelola Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi dalam perspektif *capacity building*.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terperinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Selain itu juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu (Sugiyono, 2008:34).



Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:237) berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang *inquiri* (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria *inquiri*-eksekusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan digunakan.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah dijelaskan oleh para ahli, maka beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulisan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar tradisional Baturetno I pra revitalisasi yang telah dilakukan meliputi:
  - a) Sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar
  - b) Sistem keamanan dan ketertiban
  - c) Sistem kebersihan dan penanganan sampah
  - d) Sistem perparkiran
  - e) Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana
2. Kritik terhadap pengelolaan pasar tradisional Baturetno I, antara lain:  
Keluhan dari *stakeholders*: a) Paguyuban Pedagang Pasar Baturetno (P3B)  
b) Pengunjung

3. Strategi pengelolaan pasar Baturetno I pasca revitalisasi yang dapat dilakukan dalam perspektif *capacity bulding*.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan lokasi ini peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang ditetapkan. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan daerah dimana suatu kebijakan dan program telah terlaksana dan merupakan Kabupaten dengan perkembangan sektor perdagangan yang baik.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan situs penelitian pada:

1. Pasar Tradisional Baturetno I yang terletak di Jalan Raya Solo – Pacitan Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.

Situs ini dipilih karena peneliti mengamati bahwa program revitalisasi Pasar Tradisional Baturetno I yang dilakukan sejak Mei 2017 masih tergolong baru. Selain itu, perlu adanya perbaikan pengelolaan pasar

pasca revitalisasi agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Disisi lain, Pasar Tradisional Baturetno I letaknya sangat strategis yang menjadikan pasar tersebut memiliki perputaran ekonomi yang tinggi di Kabupaten Wonogiri. Jika Pasar Tradisional Baturetno I dikelola dengan baik pasca revitalisasi maka akan berpeluang untuk lebih berkembang karena menggunakan sistem pengelolaan pasar secara modern yang menerapkan prinsip efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Disamping itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penentuan metode pengumpulan data, sumber data penelitian merupakan faktor penting yang harus menjadi pertimbangan. Jenis data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sederhananya dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari narasumber. Data ini kemudian diamati dan dicatat, atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri
  - b) Kepala Pasar Baturetno I
  - c) Paguyuban Pedagang Pasar Baturetno (P3B)
  - d) Pedagang
  - e) Petugas Kebersihan
  - f) Petugas Parkir
  - g) Penjaga Toilet/ Kamar Mandi
  - h) Konsumen/ Pengunjung
2. Data sekunder, adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung bagi peneliti. Data yang telah tersedia tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber pustaka tertulis dan dokumentasi meliputi laporan penelitian ilmiah, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan informasi/data yang diperlukan dan referensi dari internet maupun koran untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Selain itu dokumentasi berupa foto yang sekarang ini sudah banyak digunakan sebagai alat untuk membantu penelitian kualitatif berupa foto yang dihasilkan orang di luar peneliti dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2008:224). Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik dimana peneliti mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan (Kriyanto, 2008:98). Ditinjau dari pelaksanaannya menurut Arikunto (2006:145) wawancara dibedakan menjadi:

- a) *Interview* bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja;
- b) *Interview* terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap terperinci;
- c) *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan *interview* terpimpin. Pewawancara hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe *interview* bebas terpimpin, yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua aspek objek yang diteliti. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk mendapatkan data yang memadai tentang objek penelitian secara langsung dari kata dan tindakan informan.

## 2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2008:66). Selanjutnya Sugiyono (2008: 229), objek observasi terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini pertama-tama peneliti melakukan observasi secara tidak langsung yaitu melalui artikel dan surat kabar untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri di Pasar Tradisional Baturetno I. Melalui artikel dan surat kabar peneliti dapat mengetahui suatu kebijakan revitalisasi pasar Baturetno dilaksanakan. Berangkat dari kebijakan revitalisasi pasar yang telah dilakukan di Pasar Tradisional Baturetno I dan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan dipasar lain yang dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung.

## 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada



di lokasi penelitian yang dianggap penting. Hal tersebut dapat dilakukan secara manual dengan menghimpun data dari lokasi secara langsung baik berupa buku laporan, peraturan-peraturan serta dokumen mengenai objek penelitian. Cara lain dengan komputerisasi atau akses di internet.

#### **F. Instrumen Penelitian**

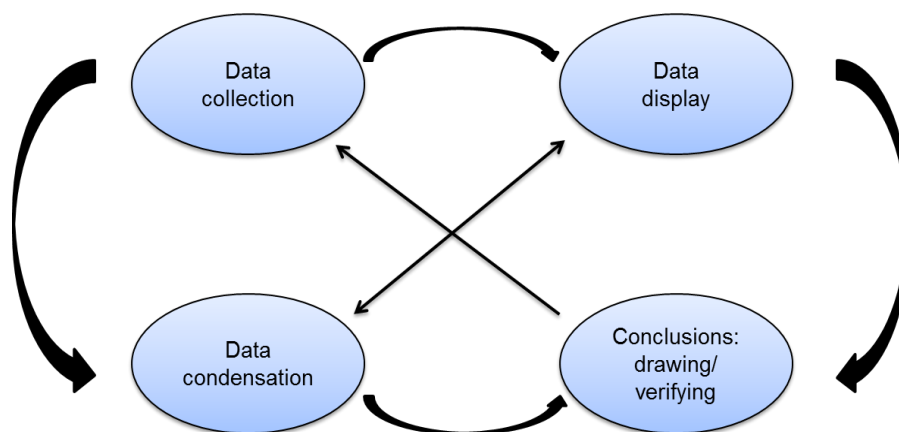
Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu yang dapat diwujudkan dalam bentuk angket, pedoman wawancara lembar pengamatan dan panduan pengamatan lainnya. Moleong (2005:117) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta, namun peneliti yang sangat menentukan keseluruhan skeneraionya. Instrument yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data di lapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan melakukan wawancara. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008:222), bahwa dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti melakukan validasi sendiri, melalui evaluasi dari seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

2. Perangkat penunjang, yang meliputi catatan dan alat tulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum dapat dari dokumen tertulis.
3. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data terutama dalam melakukan wawancara.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dijadikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Di dalam analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) terdapat beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/ Vefifications*. Berikut ini dapat kita lihat komponen analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) serta penjelasannya.



**Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)*

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, Kepala Pasar Tradisional Baturetno I, dan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baturetno (P3B), Pedagang, Petugas Kebersihan, Petugas Parkir, Penjaga Toilet/ Kamar Mandi dan Konsumen/ Pengunjung. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi bertujuan sebagai bahan penunjang yang memperkuat data-data wawancara yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti dalam tahap ini melakukan pengumpulan data secara terus menerus sehingga data yang dikumpulkan lengkap dan relevan dengan penelitian.

### 2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan dengan cara; data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting, kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, sehingga diharapkan nantinya akan diklasifikasikan dan diperoleh suatu verifikasi yang jelas dan terarah.

### 3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-peyajian tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk bisa melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Verifying*)

Kegiatan analisis terakhir yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian

berlangsung. Data yang diperoleh disajikan sedemikian rupa dan dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan yang telah ditarik, diverifikasikan, baik berdasarkan kerangka piker penelitian maupun catatan-catatan yang ada, agar data tersebut valid dan mencapai konsesnsus pada tingkat optimal antara peneliti dengan informan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Wonogiri

###### a) Arti Lambang



**Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Wonogiri**

*Sumber: Website [humas.wonogirikab.go.id](http://humas.wonogirikab.go.id)*

Berbentuk perisai berwarna kuning emas bertepi hitam, sebagai penonjolan sifat pengayoman dan kebesaran daerah. Lambang Daerah berisi lukisan segilima sama sisi berwarna merah di sebelah kanan dan putih di sebelah kiri dengan tepi hitam, sebagai manifestasi daripada Pancasila, Sang Saka, kesetiaan terhadap UUD 1945 dan falsafat hidup bangsa Indonesia yang abadi.

Di dalam segilima terlukis ditengah dari atas ke bawah, sebagai berikut :



1. Bintang bersudut 5 berwarna kuning emas, sebagai lambang Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai berwarna kuning emas, berbentuk lingkaran, sebagai lambang kegotongroyongan yang didasari oleh perikemanusiaan.
2. Di dalam lingkaran rantai tersebut terlukis perwujudan kondisi daerah sebagai berikut :
  - Gunung Kapur / seribu berwarna putih dengan latar belakang langit berwarna hijau.
  - Hutan berwarna hijau
  - Tanah berwarna coklat
  - Air berwarna biru dengan gelombang putih, sebagai pernyataan bahwa Bengawan Solo, Waduk Serbaguna Wonogiri dan Pantai Selatan, penting artinya di sepanjang sejarah Wonogiri.
  - Gunungan wayang berwarna kuning emas, sebagai pernyataan bahwa rakyat Wonogiri menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.
  - Keris lekuk 5 berwarna hitam dengan pamor kuning emas sebagai lambang semangat kepahlawanan yang dijiwai semangat Pancasila.
  - Ketela Pohon yang berisi 8 buah berwarna coklat sebagai hasil pertanian yang menonjol dan sekaligus sifat agraris dari daerah.

Di dalam segi lima terlukis sebagai lambang keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan oleh rakyat Wonogiri, sebagai berikut

1. Setangkai Kapas terdiri atas 17 kuntum berwarna putih perak dengan selingan daun berwarna hijau, sebelah kanan.
2. Setangkai Padi terdiri atas 45 butir berwarna kuning emas.

Bidang Lingkaran berwarna Hijau yang dibatasi oleh lukisan kapas dan padi tersebut berarti kesuburan. Bilangan “Tujuh Belas” pada lukisan setangkai kapas, bilangan “Delapan” pada lukisan ketela Pohon dan bilangan “Empat Puluh Lima” pada lukisan padi mengandung pernyataan, bahwa rakyat Kabupaten Wonogiri berpegang teguh pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut.

Di bawah segilima terlukis selendang berwarna merah putih bertepi hitam dan tercantum tulisan sebagai berikut :

1. Pada bagian atas berwarna merah tercantum tulisan berbunyi ” Wonogiri” dengan huruf balok putih.
2. Pada bagian bawah berwarna putih tercantum tulisan sebagai Surya Sengkala berbunyi “Sabda Sakti Nugrahaning Praja” dengan huruf balok hitam.

Suryasengkala tersebut mempunyai arti, Sabda = 7, Sakti = 6, Nugrahaning = 9, dan Praja = 1, sebagai peringatan di tetapkannya Lambang Daerah pada tahun 1967.

#### **b) Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri**

Dalam rangka membangun dan mengelola pemerintahan di kabupaten Wonogiri di perlukan konsep pengelolaan dan manajemen pemerintahan yang baik. Sehingga visi dari Kabupaten Wonogiri, yaitu:

“Membangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”

“SUKSES” dalam hal ini adalah sebuah motto Kerja Kabupaten Wonogiri yang telah ada sejak tahun 1986. Sukses bukan sekedar simbol atau Jargon Wonogiri tetapi lebih pada konsep manajemen pengelolaan dan membangun Wonogiri dengan pengertian sebagai berikut:

1. S singkatan dari Stabilitas, memiliki makna bahwa dalam membangun Wonogiri stabilitas merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam melaksanakan pemerintahan, iklim yang kondusif baik di pemerintahan maupun di masyarakat adalah salah satu hal yang wajib ada;
2. U singkatan dari Undang-undang, mengandung arti bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembagunan peraturan Per-Undang-undangan merupakan pijakan yuridis yang tak bisa di tawar;
3. K singkatan dari Koordinasi, mengandung arti bahwa jika jalinan koordinasi dilakukan baik ke atas dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi, koordinasi kesamping dalam hal ini ke lembaga legislatif ataupun forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) maupun koordinasi kebawah dalam hal ini kepada perangkat daerah dan masyarakat. Dari koordinasi ke atas diharapkan ada sinkronisasi program sekaligus harapan bisa mendatangkan bantuan yang lebih banyak dari pemerintah pusat untuk pembangunan Wonogiri, dari

koordinasi kesamping diharapkan ada harmonisasi dan keselarasan dalam membuat kebijakan dengan lembaga legislatif dan dengan koordinasi kebawah akan tercipta partisipasi masyarakat dalam sumbang sihnya untuk kemajuan Wonogiri;

4. S singkatan dari Sasaran, memiliki arti bahwa perencanaan dalam hal apapun harus jelas dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah di sepakati bersama dengan lembaga legislatif;
5. E singkatan dari Evaluasi; mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan program yang telah di laksanakan harus selalu di lakukan evaluasi guna peningkatan kualitas maupun kuantitas pada program tersebut.
6. Evaluasi ini nantinya akan memerlukan sebuah keterbukaan terhadap kritik, kemauan untuk di kritik dan keinginan untuk mengkritik diri sendiri;
7. S singkatan dari Semangat Juang, mengandung arti bahwa tanpa adanya semangat juang dari dalam diri kita maupun seluruh elemen penyelenggara pemerintahan mustahil program apapun tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai pembawa amanah rakyat Wonogiri akan menempatkan diri sebagai motivator sekaligus obor guna membarakan semangat juang dalam membangun Wonogiri;
8. BERIMAN, artinya bahwa masyarakat Wonogiri harus berTuhan dan memiliki keyakinan masing-masing sesuai dengan Agama yang di anut. Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan mendorong semua kegiatan keagamaan, yang Islam laksanakan gerakan Wonogiri

mengaji, yang Kristen, Katolik, Budha , Hindu, Konghucu dan aliran kepercayaan silahkan untuk menggagas gerakan, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkewajiban mendorongnya agar masyarakat Wonogiri Religius;

9. BERBUDAYA, artinya bahwa mengembangkan budaya yang pernah ada dan tumbuh berkembang di masyarakat Wonogiri seperti tradisi dan adat di masing-masing dusun di wilayah Wonogiri, termasuk melestarikan budaya ketimuran saling menghormati menghargai dan menjunjung tinggi etika sopan santun di masyarakat;
10. BERKEADILAN, artinya bahwa dalam bidang pembangunan, keagamaan dan lain- lain Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan berbuat seadil-adilnya bagi terciptanya kemakmuran bersama;
11. BERDAYA SAING, artinya bahwa Wonogiri baik dari sisi pemerintahanya, orang- orangnya, potensi-potensinya harus memiliki daya saing yang tinggi dan sehat sehingga saling di perhitungkan baik dalam konteks pemerintahan maupun kualitas sumber daya manusianya yang menyangkut tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
12. DEMOKRATIS, memiliki makna bahwa dalam penyelenggaran umum pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan dan urusan yang di miliki daerah harus dilaksanakan secara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat.

Sedangkan misi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri antara lain:

1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat;
3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa;
4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain;
5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat Wonogiri;
6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang;



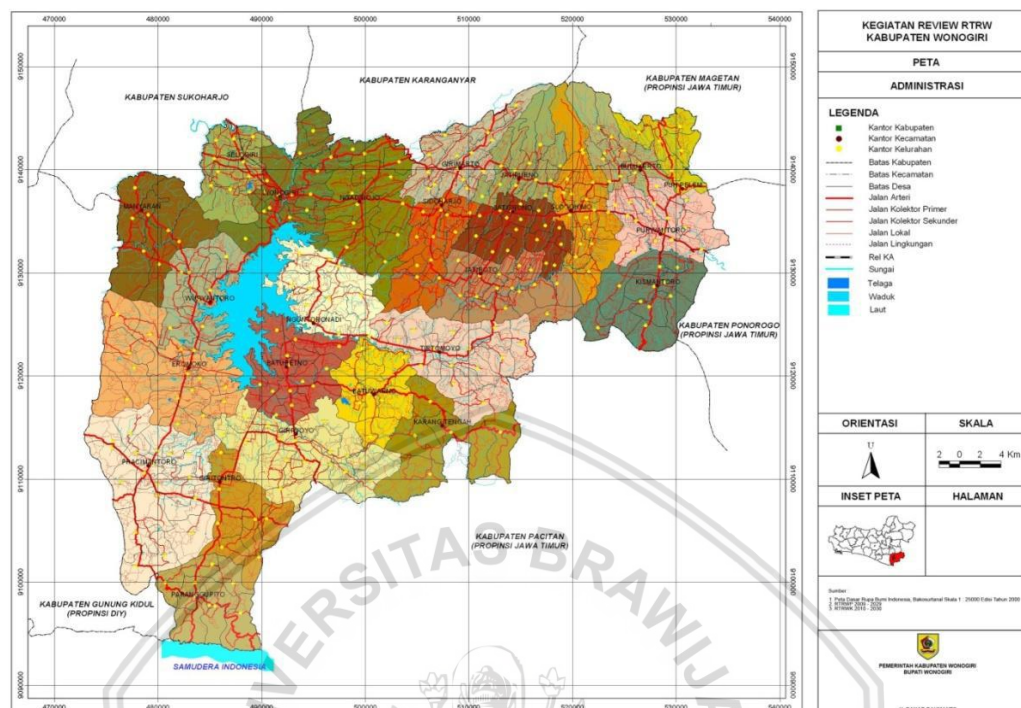
7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi didalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari pembentukan visi dan misi yaitu agar pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugasnya memiliki dasar acuan sehingga dapat tercapainya visi dan misi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

**c) Letak Geografis**

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten tetangga, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Samudera Indonesia.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



**Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri 2016-2021*

Secara astronomis, Kabupaten Wonogiri terletak antara  $7^{\circ} 32' - 8^{\circ} 15'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 41' - 111^{\circ} 18'$  Bujur Timur. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan + 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 300, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda. Secara rinci Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 4 wilayah topografi, yaitu:

1. Wilayah dengan topografi datar (kemiringan lahan 0 – 2%) memiliki luas wilayah 432 Hektar. Wilayah dengan topografi datar ini umumnya

termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo Hulu, DAS Sungai Keduwang, DAS Sungai Wiroko, DAS Sungai Temon, DAS Sungai Alang serta DAS Sungai Ngungghahan;

2. Wilayah dengan topografi bergelombang (kemiringan lahan 2 – 15%) memiliki luas wilayah 7.865 Hektar. Wilayah dengan topografi bergelombang ini menempati hampir semua wilayah Kabupaten Wonogiri;
3. Wilayah dengan topografi curam (kemiringan lahan 15 – 40%) memiliki luas wilayah 237 hektar. Wilayah dengan topografi curam ini menempati wilayah Kecamatan Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwanto dan Kismantoro; dan
4. Wilayah dengan topografi sangat curam (kemiringan lahan > 40%) memiliki luas wilayah 96 hektar. Wilayah dengan topografi sangat curam ini menempati wilayah Kecamatan Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo, Puhpelem, Purwanto dan Kismantoro.

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi atas 25 Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota kabupaten sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan Puhpelem yang memiliki luas wilayah 3.162 ha merupakan kecamatan

yang tersempit wilayahnya, sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pracimantoro dengan luas wilayah 14.214,3 ha. Sementara Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya yang berada pada ketinggian 600m di atas permukaan air laut dan yang paling rendah adalah Kecamatan Selogiri yang berada pada ketinggian 106m di atas permukaan air laut.

Menurut Stasiun Meteorologi Kabupaten Wonogiri, suhu udara rata-rata di Wonogiri tahun 2016 berkisar antara 28,35°C sampai dengan 28,75°C. Suhu udara maksimum mencapai 39°C sedangkan suhu udara minimum hingga 19,28°C.

**d) Potensi Pengembangan Wilayah**

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada 2016 sebesar 2.035,056 milyar. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 1.963,704 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 yang diperoleh yaitu 218,604 milyar dimana penyumbang terbesar adalah PAD lain senilai 152,8 milyar. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 1.145,434 milyar.

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri  
Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2015–2016**

Jenis Pendapatan		2015	2016
(1)		(2)	(3)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>211.208.601,20</b>	<b>218.604.854,60</b>
1.1	Pajak Daerah	31.486.086,95	34.831.059,27
1.2	Retribusi Daerah	18.593.204,68	19.796.736,55
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.839.243,46	11.176.328,65
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	150.290066,11	152.800.730,13
<b>2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.14610068,06</b>	<b>1.470168336,26</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	27.080.143,11	34.233.013,49
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.509.546,95	1.379.977,80
2.3	Dana Alokasi Umum	1.031.393472,00	1.145.434.277,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	86.117.520,00	289.121.067,98
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>606.395.255,47</b>	<b>346.283.344,51</b>

	<b>yang Sah</b>		
3.1	Pendapatan Hibah	2.598.871,15	8.686.293,65
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	102.29. 243,67	99.994.425,86
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	437.896.092,00	192.177.735,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	63.605.048,65	45.424.890,00
3.6	Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.963.704.538,73</b>	<b>2.035.056.535,37</b>

*Sumber: Wonogiri Dalam Angka (2017:188)*

#### e) Aspek Demografis

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berikut tabel perkembangan penduduk di Kabupaten Wonogiri.



**Grafik 4.1 Perkembangan Penduduk Wonogiri Tahun 2011-2015**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan dalam periode 2010-2014. Dengan menggunakan data BPS jumlah penduduk meningkat dari 928.904 jiwa tahun 2010 menjadi 945.817 tahun 2014. Dari aspek komposisi penduduk, dalam periode tersebut jumlah penduduk perempuan lebih besar (rata-rata 51,37%) dibanding jumlah penduduk laki-laki (48,63%). Pertumbuhan penduduk dalam periode tersebut, rata-rata 0,45%, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 0,62%, dan terendah tahun 2014 sebesar 0,37%.

#### **f) Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Penduduk Wonogiri berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2015 mencapai 753.854 orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 521.058 orang, dimana 505.043 orang diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha,

sedangkan sisanya 16.015 masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran menjadi 3,07%.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	142.408	129.844	272.252
Pertambangan dan Penggalian	1.683	-	1.683
Industri Pengolahan	13.867	14.725	28.592
Listrik, Gas, dan Air	621	-	621
Bangunan	46.385	1.002	47.387
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	37.899	42.539	80.438
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	15.135	545	15.680
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	6.783	637	7.420

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	25.607	25.363	50.970
<b>Jumlah/Total</b>	290.388	214.655	505.043

*Sumber: Kabupaten Wonogiri Dalam Angka (2017: 47)*

### **Pertumbuhan PDRB**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri dalam periode tahun 2011-2015, rata-rata sebesar 4,99%, dengan pertumbuhan terendah tahun 2011 sebesar 3,5% dan tertinggi tahun 2012 sebesar 5,94%. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah Sektor Jasa Pendidikan sebesar 12,84% per tahun, kemudian Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,41%, Jasa Perusahaan sebesar 9,97% dan Jasa Kesehatan sebesar 9,35%. Pertumbuhan terendah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata sebesar 2,17% pertahun.

**Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun  
2011-2015**

<b>Lapangan Usaha</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan</b>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	4,56	1,04	0,77	3,81	2,17
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	3,99	6,55	9,13	9,27	3,47	6,48
<b>C</b>	Industri	6,43	6,78	8,53	7,74	6,18	7,13

	Pengolahan						
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	9,02	10,45	9,32	4,93	- 2,70	6,21
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,63	3,77	- 1,06	7,56	2,18	3,02
<b>F</b>	Konstruksi	3,19	9,25	5,72	5,15	6,41	5,94
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,10	4,77	4,93	6,06	5,21	5,01
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	3,89	7,07	8,44	10,9 1	8,03	7,67
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,25	4,61	4,00	5,00	5,65	4,50
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	9,91	10,29	9,73	17,6 9	9,41	11,41
<b>K</b>	Jasa Keuangan	6,86	6,60	4,22	5,26	7,12	6,01

	dan Asuransi						
<b>L</b>	Real Estate	6,58	2,56	7,84	8,45	8,03	6,69
<b>M, N</b>	Jasa Perusahaan	12,5 9	5,46	11,5 0	11,7 0	8,58	9,97
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00	0,14	2,44	1,24	6,09	2,18
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	15,2 1	19,13	9,84	12,4 6	7,55	12,84
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,29	9,18	7,91	12,5 4	7,82	9,35
<b>R, S, T, U</b>	Jasa lainnya	3,06	-0,83	10,8 8	9,85	3,32	5,25
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		3,58	<b>5,94</b>	<b>4,79</b>	<b>5,26</b>	<b>5,37</b>	4,99

Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

### Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah indikator kinerja ekonomi makro baik nasional maupun daerah karena pengaruhnya negatif terhadap daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi akan menggerogoti daya beli, karena kenaikan harga-harga akan menekan kenaikan pendapatan, sehingga kenaikan pendapatan yang ada tidak bermanfaat karena quantity barang yang bisa dibeli tidak meningkat atau dengan kata lain dengan inflasi yang tinggi daya beli akan menurun.

**Grafik 4.2 Laju Inflasi Di Wonogiri Tahun 2011-2015**



*Sumber: RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021*

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi di Wonogiri dalam periode 2009-2015 fluktuatif dan cenderung naik. Dalam periode tersebut angka inflasi terendah sebesar 2,13% tahun 2009 dan tertinggi sebesar 8,6% tahun 2013 dengan rata-rata sebesar 5,10%.

**g) Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri**



Berikut penjelasan mengenai pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri, antara lain:

**Tabel 4.4 Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri**

No	Nama Pasar	Alamat
1.	Wonogiri	Bauresan RT 03/01 Giritirto, Wonogiri
2.	Baturetno I	Baturetno Lor RT 01/17 Baturetno, Wonogiri
3.	Baturetno II	Baturetno Lor RT 01/17 Baturetno, Wonogiri
4.	Jatisrono	Jatisari RT 03/01 Jatisari, Jatisrono, Wonogiri
5.	Hewan Jatisrono	Jatisari RT 03/01 Jatisari, Jatisrono, Wonogiri
6.	Pracimantoro	Ngulu Wetan RT 04/10 Pracimantoro, Wonogiri
7.	Hewan Pracimantoro	Blindas RT 04/05 Pracimantoro, Wonogiri
8.	Purwantoro	Wates Kulon RT 02/03 Bangsri, Purwantoro, Wonogiri
9.	Baru Purwantoro	Bangsri RT 02/03, Purwantoro, Wonogiri
10.	Hewan Purwantoro	Tegalrejo RT 01/02 Purwantoro, Wonogiri
11.	Slogohimo	Bulusari RT 02/02, Slogohimo, Wonogiri
12.	Hewan Slogohimo	Bulusari RT 02/02, Slogohimo, Wonogiri

13.	Ngadirojo	Kenteng RT 02/03, Ngadirojo, Wonogiri
14.	Sidoharjo	Jarum RT 03/01, Sidoharjo, Wonogiri
15.	Hewan Sidoharjo	Gempol RT 06/02, Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri
16.	Manyaran	Kedung Klepu RT 01/02, Karang Lor, Manyaran, Wonogiri
17.	Tirtomoyo	Tirtomoyo RT 03/IX, Tirtomoyo, Wonogiri
18.	Hewan Tirtomoyo	Balerejo RT 01/01, Hargantoro, Tirtomoyo, Wonogiri
19.	Jatiroto	Jangan RT 02/01, Jatiroto, Wonogiri
20.	Baru Jatiroto	Jangan RT 02/02, Jatiroto, Wonogiri
21.	Wuryantoro	Wuryantoro Kidul RT 02/01, Wuryantoro, Wonogiri
22.	Hewan Wuryantoro	Wuryantoro Kidul RT 02/01, Wuryantoro, Wonogiri
23.	Eromoko	Eromoko Wetan RT 04/03, Eromoko, Wonogiri
24.	Puhpelem	Puhpelem RT 01, Puhpelem, Wonogiri
25.	Bulukerto	Bulurejo RT 01/05, Bulukerto, Wonogiri
26.	Girimarto	Jl. Sinuwung, Girimarto, Wonogiri
27.	Giritontro	Giritontro, Wonogiri
28.	Giriwoyo	Ngebrak Lor RT 01/IV, Giriwoyo, Wonogiri

29.	Nguntoronadi	Pucung RT 02/03, Nguntoronadi, Wonogiri
30.	Batuwarno	Batuwarno, Wonogiri
31.	Kismantoro	Klitik RT 04/05, Ngiri, Kismantoro, Wonogiri
32.	Giribelah	Jatiretjo RT 01/07, Giribelah, Wonogiri
33.	Selogiri	Josutan RT 01/02, Selogiri, Wonogiri
34.	Krisak	Singodutan RT 03/01, Selogiri, Wonogiri
35.	Wonokarto	Wonokarto RT 01/V, Wonokarto, Wonogiri
36.	Sidorejo	Jatirejo RT 02/VIII Wonoboyo, Wonogiri
37.	Jatipurno	Kuryo RT 01/03, Jatipurno, Wonogiri

*Sumber: Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 37 pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Wonogiri. Pasar-pasar tersebut termasuk pasar hewan yang berada di kecamatan Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, Slogohimo, Sidoharjo, Tirtomoyo, dan Wuryantoro.

## **B. Gambaran Umum Situs Penelitian**

### **1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri**

#### **a) Sejarah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri terbentuk untuk menyelenggarakan

kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) OPD sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kewajiban dari setiap OPD untuk menyusun rencana strategis (renstra) merupakan ketentuan dari pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**b) Tupoksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri**

Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2016, Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**TUGAS POKOK**

“ Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan “.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas;
- 6) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut diatas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas KUMKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang Koperasi Usaha dan Mikro, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pengelolaan Pasar.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Badan;
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- 5) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, mempunyai fungsi :



- 1) Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Perindustrian, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Perindustrian;

- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Perdagangan, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perdagangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Perdagangan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, melalui Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing bidang memiliki tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Terkait dengan pengelolaan pasar maka pihak yang bertanggungjawab dalam melakukannya yaitu Bidang Pengelolaan Pasar.

**c) Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri**

Visi Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri adalah sama dengan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil Usaha Industri dan Perdagangan yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing “.

Sedangkan Misi tersebut sesuai dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai tugas pokok dan fungsi Dinas

KUKM dan Perindag adalah visi nomor 4, yaitu “Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-daerah Lain “

Selanjutnya untuk menjembatani visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah, Dinas KUKM dan Perindag periode 2016 -2021 memiliki 2 (dua) misi dalam membangun sektor koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro pada Peningkatan Perekonomian Daerah.
- 2) Meningkatkan Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

## **2. Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri**

### **a) Sejarah Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri**

Pasar Tradisional Baturetno I atau setelah revitalisasi menjadi Pasar Bung Karno merupakan pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1945. Pasar Tradisional Baturetno I berdiri pada masa penjajahan Belanda awalnya hanya terdiri dari beberapa pedagang saja. Lokasi Pasar Tradisional Baturetno I cukup strategis berada dekat dengan jalan raya yaitu terletak di Jalan Jalan Raya Solo - Pacitan No.Km 1, Baturetno. Sedangkan untuk luas pasar yaitu kurang lebih 9.881 meter persegi atau hampir mencapai 1 hektare (ha).

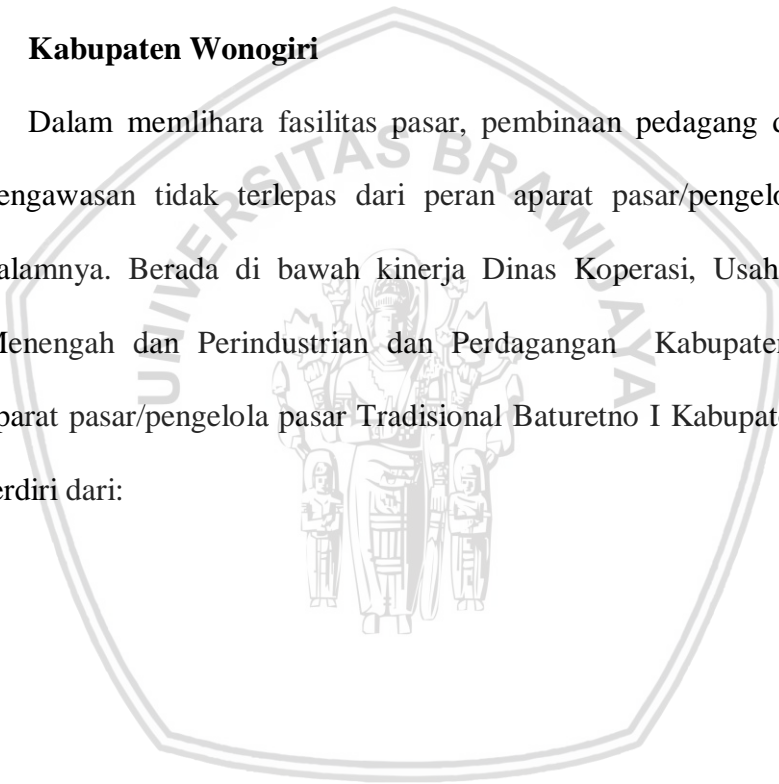
Pasar Tradisional Baturetno I merupakan pasar yang menjual kebutuhan pokok, seperti sayuran, buah-buahan, pakaian, daging, sembako dan lain-lain. Dalam perkembangannya, Hampir 15 tahun pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri belum tersentuh program pembangunan dari pemerintah. Pasar Tradisional Baturetno I seakan terlupa dari sentuhan kebijakan pemerintah dan kondisinya memprihatinkan. Beberapa bagian yang memerlukan perbaikan yaitu struktur bangunan pasar, lahan parkir, fasilitas penunjang pasar, atap pasar, tingkat kebersihan pasar, penataan PKL, tempat pembuangan sampah, sistem pengelolaan pasar dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri hanya berorientasi pada faktor ekonomis dimana hanya berfokus pada penerimaan retribusi dan mengenyampingkan faktor manajemen pengelolaan pasar (*non fisik*).

Sehingga pada tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri memiliki program revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pertama kali dilakukan di Pasar Tradisional Baturetno I dimana proses revitalisasi tersebut selesai pada awal tahun 2018 dan mulai ditempati pada bulan Maret. Pasar Tradisional Baturetno I berganti nama menjadi Pasar Bung Karno pasca revitalisasi. Pasar Tradisional Baturetno I dibangun 2 lantai, secara fisik, pasar Baturetno terdiri dari los dan kios dan terdapat penambahan jumlah kios sebanyak 29 kios. Saat ini Pasar Tradisional Baturetno I memiliki 126 kios dan 1.174 los. Penempatan pedagang yaitu menggunakan sistem zonasi, dan terdapat tempat bongkar muat barang

dilantai 2 serta ada penampahan jumlah toilet umum, lokasi parkir, taman pasar, pos keamanan satpam dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Pasar Tradisional Baturetno I merupakan pasar harian, dimana proses kegiatan transaksi terjadi setiap hari dimulai pada pukul 02.00 dini hari sampai pasar tutup.

**b) Aparat Pasar/Unit Pengelola Pasar Daerah Baturetno I  
Kabupaten Wonogiri**

Dalam memlihara fasilitas pasar, pembinaan pedagang dan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari peran aparat pasar/pengelola pasar di dalamnya. Berada di bawah kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, aparat pasar/pengelola pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri terdiri dari:





**Tabel 4.5 Aparat Pasar Tradisional Baturetno I/Pengelola Pasar Tradisional Baturetno I**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Lama Bekerja</b>
Sularno	Kepala Pasar Tradisional Baturetno I	SMA	30 tahun
Wiyono	Bendahara	SMA	31 tahun
Maryoto	Koordinator penarik retribusi	SMA	30 tahun
Tri Widodo	Penarik retribusi	SMA	29 tahun
Rukijo	Penarik retribusi	SMA	29 tahun
Sugiman	Penarik retribusi	SMA	25 tahun
Istarno	Penarik retribusi	SMA	25 tahun
Kentut Sukiman	Penarik retribusi	SMA	31 tahun
Yoga	Koordinator kebersihan	S1	Baru
Krisdiyanto	Wakil koordinator kebersihan	SMA	Baru
Andri	Wakil coordinator kebersihan	SMA	Baru
Hartanto	Koordinator	SMA	10 tahun

	Ketertiban		
Beny	Wakil koordinator ketertiban	SMA	10 tahun

Sumber: Dokumen Aparat Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten

Wonogiri 2018, diolah.

**c) Inventaris Kantor Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten  
Wonogiri**

Dalam mendukung kinerja aparatur pasar maka diperlukan alat-alat pendukung yang termasuk dalam inventaris kantor, antara lain:

**Tabel 4.6 Daftar Inventaris Pasar Tradisional Baturetno I  
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018**

Nama Barang	Jumlah
Almari Kayu	3
Meja Kayu	6
Kursi Kayu	16
Filling Kabinet	1
Mesin Ketik	1
Tabung Pemadam Kebakaran Dry Powder	9
Komputer	1
Printer	1
Komputer LG	1

Papan Data	1
Kursi Besi/Kerja	2
Meja Kayu	4
Meja/Kursi Tamu	1
Kursi Lipat	3
Audio paging speaker	1 1

*Sumber: Dokumen Kartu Inventaris Ruangan Pasar Tradisional Baturetno I Tahun 2018, diolah.*

#### **d) Fasilitas Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri**

Pada Pasar Tradisional Baturetno I terdapat berbagai fasilitas/sarana prasarana guna mendukung dan memperlancar kegiatan di pasar. Dalam tabel 4.7 berikut terdapat sejumlah tempat yang disediakan untuk proses transaksi jual beli dalam pasar. Dibedakan menjadi kios dan los dimana kios dengan ukuran 12m<sup>2</sup>, 8m<sup>2</sup>, 7m<sup>2</sup>. Sarana lainnya antara lain musala, 6 kamar mandi yang dibagi 3 kamar mandi di lantai bawah dan 3 kamar mandi di lantai atas, lahan parkir, ruang tunggu pengunjung, pos satpam.

**Tabel 4.7 Daftar Fasilitas Pasar Baturetno I Kabupaten Wonogiri****Tahun 2018**

<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
Kios	126
Los	1.174

*Sumber: Dokumen Pasar Baturetno I Kabupaten Wonogiri Tahun**2018, diolah.*

### **C. Penyajian Data Fokus Penelitian**

#### **1. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pra Revitalisasi yang Telah Dilakukan**

Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, dalam perda tersebut terdapat 13 bab yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengelola pasar tradisional. Pada bab IV dijelaskan mengenai pengelolaan pasar tradisional baik pengelolaan pasar secara fisik dan non fisik. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi dilihat dari segi pengelolaan manajemen pasar (non fisik):

##### **a. Sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar**

Sistem penarikan retribusi di Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat pada bab XVIII (18) yang terdiri dari;

1) Bagian Kesatu, Tata Cara Pemungutan, Pasal 96;

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
5. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
6. Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
7. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2) Bagian Kedua, Tata Cara Pembayaran, Pasal 97;

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Penyetoran penerimaan hasil retribusi ke kas Daerah harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
4. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3) Bagian Ketiga, Keberatan, Pasal 98;

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 99

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
3. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 100

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan diatas, maka dalam

pemungutan retribusi pasar terdapat pihak-pihak yang terlibat, yaitu;

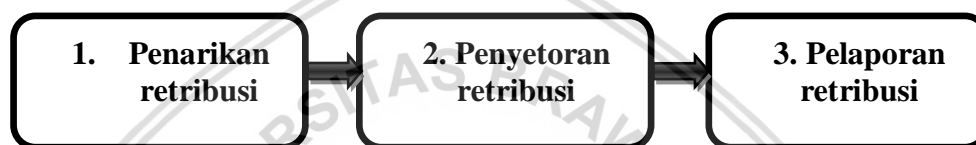
1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
2. Pemungut Retribusi adalah orang yang melakukan kegiatan mulai dari *collecting fee* (penarikan retribusi) kepada Wajib Retribusi sampai penyeteroran.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang dimaksud wajib retribusi dilingkungan pasar yaitu pedagang. Pedagang



adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa. Sedangkan pemungut retribusi merupakan aparat pengelola pasar.

Dalam melakukan tugasnya, pengelola Pasar Tradisional Baturetno I telah melakukan penarikan retribusi harian yang dilakukan mulai dari kegiatan menarik retribusi sampai penyetoran yang dapat dijelaskan lebih lanjut:



#### 1. Penarikan retribusi

Penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I dilakukan setiap hari. Terdapat petugas tetap yang melaksanakan penarikan retribusi. Sistem penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I menggunakan sistem jemput langsung dimana petugas mendatangi pedagang untuk menarik tagihan retribusi setiap hari. Dokumen yang digunakan untuk menarik retribusi yaitu menggunakan karcis dengan nominal yang telah ditetapkan. Pada Pasar Tradisional Baturetno I jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang sangat beragam dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa;

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e) Retribusi Pelayanan Pasar;
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran;
- h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
- i) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ;
- k) Retribusi Pelayanan Pendidikan , dan
- l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Peraturan daerah diatas dapat dikatan bahwa terdapat beberapa macam retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah. Khusus untuk pasar, retribusi yang dibebankan kepada pedagang dapat dikelompokkan menjadi:

**Tabel 4.8 Jenis Retribusi dan Tarif Retribusi di Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri**

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi
Retribusi Pelayanan Pasar Umum	Rp. 100,- Rp. 200, - Rp. 500,- Rp. 600,- Rp. 900,-
Retribusi Kios	Kelas A Rp. 3.000,/m <sup>2</sup> Kelas B Rp. 1.800/m <sup>2</sup>
Retribusi Sampah:	

a. Oprokan	a. Rp. 200,-
b. Los	b. Rp. 400,-
Retribusi Lereban	Rp. 300,-
Retribusi Ampalan;	
a. Kendaraan roda 4	a. Rp. 1000
b. Kendaraan roda 6	b. Rp. 2000

*Sumber: Dokumen Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri, diolah.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa ada perbedaan tarif pada karcis retribusi pelayanan pasar umum. Adanya perbedaan tarif karcis retribusi tersebut bertujuan sebagai penggabungan penarikan. Apabila tarif luas los yang dimiliki pedagang lebih dari tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan daerah dimana tarif per meter luas los yaitu Rp. 300,- sehingga menggunakan penggabungan penarikan tersebut. Terdapat pengecualian penarikan retribusi yaitu apabila pedagang tidak berjualan pada hari itu/tutup maka tidak ada penarikan pada hari itu saja dan apabila pedagang kembali berjualan maka tetap dikenakan biaya retribusi.

Maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban terhadap para pedagang dan konsumen sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang kontribusinya cukup diandalkan. Sebagai salah satu dari Pendapatan

Asli Daerah, retribusi pasar telah memberikan sumbangan terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Wonogiri.

## 2. Penyetoran Retribusi

Kegiatan penyetoran retribusi dilakukan setiap hari setelah petugas selesai melakukan penarikan retribusi kecuali hari libur Sabtu dan Minggu. Penyetoran hasil retribusi disetorkan ke kantor kas daerah yaitu BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 13.00. Sebelum hasil retribusi disetorkan ke BPD, terlebih dulu petugas menghitung hasil pendapatan retribusi di ruang kantor pengelola pasar. Setelah proses penyetoran dilakukan biasanya penarik retribusi akan mendapat Surat Tanda Setoran.

## 3. Pelaporan Retribusi

Pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelaporan pendapatan hasil retribusi kepada Disperindag yaitu BPD. Dalam hal ini, BPD sepenuhnya bertanggungjawab membuat rekapan hasil retribusi pada hari itu dalam bentuk laporan ke Disperindag. Pelaporan hasil setoran retribusi dilakukan setiap hari pada sore hari.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pasar Disperindag Kabupaten Wonogiri (A), yaitu:

“Hasil dari penarikan retribusi itu nanti disetor ke Bank 1x24 jam setiap hari, itu sesuai Perda mbak. Penarikan retribusi diberlakukan bagi mereka yang memanfaatkan pelayanan pasar” (Wawancara pada 3 April 2018 di Kantor Disperindag Kabupaten Wonogiri pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I terdiri dari tiga tahap; penarikan retribusi, penyetoran retribusi dan pelaporan retribusi. Penarikan retribusi dilakukan setiap hari oleh petugas khusus dengan sistem jemput langsung dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti. Selanjutnya penyetoran dilakukan oleh pihak penarik retribusi kepada BPD pada pukul 13.00. Terakhir, BPD bertanggungjawab dalam membuat rekapan laporan pendapatan retribusi kepada Disperindag hari itu.

#### **b. Sistem keamanan dan ketertiban**

Pada pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban pasar, pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasar yaitu satpam pasar. Satpam pasar yang terdapat pada Pasar Tradisional Baturetno I sebelum di revitalisasi yaitu berjumlah 4 orang. Hal tersebut seperti diungkapkan lebih lanjut oleh petugas satpam (H) Pasar Tradisional Baturetno I:

“Dulu sebelum tahun 2014, petugas keamanan pasar (satpam) milik paguyuban mbak. Namun, pada tahun 2014 Disperindag meminta semua petugas satpam dan kami mulai digaji sesuai UMR Kabupaten Wonogiri kalau sebelumnya pendapatan kami hanya dari iuran para pedagang. Status pekerjaan kami ini kontrak (*outsourcing*) mbak” (Wawancara pada 9 April 2018 di kantor Pengelola Pasar Tradisional Baturetno I Kabupaten Wonogiri pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Petugas satpam pasar merupakan orang-orang yang bekerja dibawah naungan Disperindag Kabupaten Wonogiri dan digaji sesuai UMR

Kabupaten Wonogiri. Sebelum tahun 2014, satpam pasar merupakan orang-orang yang bekerja atas dasar inisiatif dari Paguyupan Pedagang Pasar Tradisional Baturetno I dan digaji berdasarkan hasil iuran dari para pedagang untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Tugas satpam pasar yaitu menjaga keamanan lingkungan pasar dengan cara melakukan pengecekan pasar setiap 3 jam sekali. Selain itu mereka bekerja berdasarkan sistem *shift* yang disetujui oleh keputusan antar satpam pasar. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban pasar setiap hari dimana pada shift pagi dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00 sedangkan untuk *shift* malam yaitu pukul 17.00 sampai dengan pukul 05.00. Dalam mendukung kinerja keamanan dan ketertiban Pasar Tradisional Baturetno I, maka Disperindag memberikan sosialisasi terhadap para satpam setiap 1 tahun sekali yang dilakukan di kantor Disperindag Kabupaten Wonogiri. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, para satpam keamanan pasar belum memiliki tempat khusus (pos satpam) sehingga mereka berkumpul di emperan toko milik para pedagang.

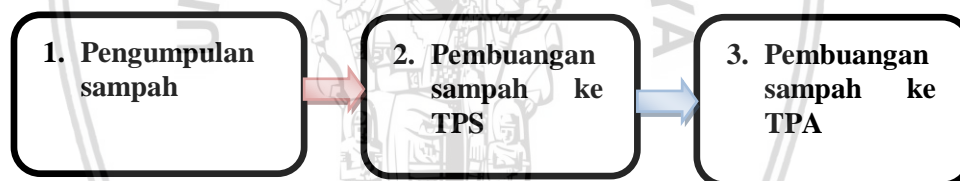
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar ialah satpam pasar yang bekerja dibawah naungan Disperindag Kabupaten Wonogiri. Mereka bekerja dengan sistem shift dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasar. Selain itu para satpam juga mendapatkan sosialisasi dari Disperindag Kabupaten Wonogiri. Namun, mereka dulu masih belum memiliki tempat sendiri (pos satpam).



### c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah

Dalam mengelola Pasar Tradisional Baturetno I, sistem kebersihan dan penanganan sampah di lingkungan pasar merupakan hal yang penting. Pengelolaan kebersihan Pasar Tradisional Baturetno I dapat dilihat dari petugas kebersihan yang mengumpulkan dan membawa sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan petugas yang menjaga dan membersihkan toilet umum/ kamar mandi di Pasar Tradisional Baturetno I.

Dilihat dari petugas kebersihan pasar dalam hal penanganan sampah yang berada di Pasar Tradisional Baturetno I, maka proses penanganan sampah yang dilakukan dapat dilihat berdasarkan penjelasan dibawah:



Berdasarkan gambar diatas dapat dikatakan bahwa sistem penanganan sampah yang dilakukan terdiri dari 3 proses, yaitu:

#### 1. Pengumpulan sampah

Kegiatan mengumpulkan sampah dimulai dari petugas yang berkeliling membersihkan sampah dari para pedagang. Petugas kebersihan/*cleaning service* membersihkan pasar pada pukul 14.00 dan biasanya berakhir pada pukul 17.00. Petugas kebersihan pada Pasar Tradisional Baturetno I berjumlah 5 orang dan masing-masing petugas membersihkan pasar setiap hari. Para petugas kebersihan

mengumpulkan dan mengangkut sampah dari para pedagang untuk dibawa ke TPS yang tersedia di pasar. Selain membersihkan sampah para petugas kebersihan juga aktif membersihkan saluran got pasar.

## 2. Pembuangan sampah ke TPS

Setelah semua sampah dari para pedagang terkumpul maka petugas membawa dan membuang sampah yang terkumpul ke TPS. Pasar Tradisional Baturetno I hanya memiliki satu TPS yang berlokasi disamping pasar.

Seperti yang diungkapkan oleh petugas kebersihan (Y) di Pasar Tradisional Baturetno I berikut;

“....selama ini sampah-sampah dari pedagang dikumpulkan jadi satu karena belum ada pemisahan sampah organik/non organik dari sampah yang berada di dekat los dan di tong sampah yang disediakan. Ada pedagang yang membuang sampah ke TPS sendiri tapi ya jarang mbak. Jadi petugas mengumpulkan sampah dan membuang ke TPS.” (Wawancara tanggal 9 April 2018 pukul 12.27 di Pasar Tradisional Baturetno I)

## 3. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Proses terakhir dari penanganan sampah di Pasar Tradisional Baturetno ialah pembuangan sampah ke TPA. Dalam proses terakhir, pihak yang bertugas mengangkut sampah dari TPS ke TPA ialah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pasar Disperindag Kabupaten Wonogiri (A):

“...idealnya sebelum sampah diangkut dari TPS ke TPA itu harusnya diolah dulu mbak. Tapi untuk sementara ini belum ada pengelolaan sampah lebih lanjut. Jadi sampah dari TPS langsung diangkut ke TPA oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan

Hidup. Tujuan pengelolaan sampah itu ya agar tercipta 3K (keindahan, kebersihan dan kenyamanan pasar).” (Wawancara tanggal 3 April 2018 di kantor Disperindag Kabupaten Wonogiri pukul 12.15 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa proses penanganan sampah di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I dilakukan oleh petugas kebersihan/*cleaning service* pasar setiap hari. Proses tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan sampah, pembuangan sampah ke TPS dan pembuangan sampah ke TPA yang dilaukan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.

Petugas kebersihan pasar merupakan pekerja yang diangkat oleh Disperindag sebagai tenaga tetap non PNS dengan sistem upah UMR Kabupaten Wonogiri. Selain itu terdapat kegiatan bersih pasar yang dilakukan setiap ada hari pasaran di pasar yaitu pada hari Jumat *Kliwon* satu bulan sekali. Namun sejauh ini belum ada pengelolaan lebih lanjut seperti pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, toilet umum/kamar mandi harus mengacu pada standar berikut:

- a. Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut:

No	Jumlah Pedagang	Jumlah Kamar Mandi	Jumlah Toilet
1	s/d 25	1	1
2	25 s/d 50	2	2
3	51 s/d 100	3	3
Setiap penambahan 40—100 orang harus ditambah satu kamar mandi dan satu toilet			

- b. Didalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan bebas jentik
- c. Didalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan dan bak air
- d. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi demham sabun dan air yang mengalir
- e. Air limbah dibuang ke *septic tank (multi chamber)*, *riol* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10m dari sumber air bersih
- f. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan
- g. Letak toilet terpisah minimal 10m dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan
- h. Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayaan 100 lux

- i. Tersedianya tempat sampah yang cukup.

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan pengelola pasar (W) berikut:

“...kalau masalah pengelolaan toilet umum/kamar mandi kami tentu menyediakan tempat yang sesuai dengan peraturan, tentunya dibedakan atas laki-laki dan perempuan, kalau air bersih kita tidak pernah kekurangan karena kita ada sumur sendiri mbak, saluran air baik. Kalau untuk pengelolaan, dulu diserahkan ke tender (swasta) sekarang toilet umum/kamar mandi dikelola pasar lagi mbak. Tapi kami menunjuk penjaga toilet umum/kamar mandi yang dulu untuk mengelola dibawah pengelola pasar” (Wawancara 9 April 2018 pukul 11.35 di kantor Pasar Tradisional Baturetno I).

Pernyataan tersebut senada dengan penjaga toilet umum/kamar mandi Pasar Tradisional Baturetno I (N) berikut:

“Dulu pengelolaan toilet umum/kamar mandi dipegang tender (swasta) neng. Tapi enam bulan sebelum pasar di revitalisasi pengelolaan toilet umum/kamar mandi diminta oleh pemerintah lagi. Jadi bisa dibilang sekarang saya bekerja dibawah pengelola pasar, kalau dulu saya ikut tender (swasta). Kalau untuk kebersihan toilet umum/kamar mandi keadaannya masih seadanya neng, apalagi waktu di pasar darurat waktu pasar di revitalisasi, kondisi disana makin parah. Saya disini ditugaskan untuk menjaga dan merawat kebersihan toilet” (Wawancara pada 9 April 2018 pukul 13.30 di Pasar Tradisional Baturetno I).

Kesimpulannya adalah bahwa pengelolaan toilet umum/kamar mandi di Pasar Tradisional Baturetno I sepenuhnya menjadi tanggungjawab penjaga toilet umum/kamar mandi yang berada di bawah pengawasan pengelola pasar. Penjaga toilet umum/kamar mandi diberikan kepercayaan untuk membersihkan, menjaga dan merawat toilet umum/kamar mandi di Pasar Tradisional Baturetno I. Selain itu, penjaga toilet umum/kamar mandi berkewajiban untuk menyetorkan hasil retribusi

Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebesar Rp. 350.000,- setiap hari kepada pengelola pasar.

#### **d. Sistem perparkiran**

Sistem pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I sepenuhnya merupakan tanggungjawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pasar Disperindag Kabupaten Wonogiri (A) berikut:

“...kalau untuk pengelolaan parkir itu bukan kewenangan disperindag mbak tapi dinas perhubungan (dishub). Meskipun mereka memanfaatkan lahan kami (pasar) petugas parkir itu dibawah koordinator dinas perhubungan. Jadi pengelolaan parkir itu tanggungjawab dishub. Kami (disperindag) hanya bertugas menyediakan tempat saja. Hasil retribusi parkir masuknya ke dinas perhubungan meskipun itu di dalam pasar” (Wawancara pada 3 April 2018 di Dsperindag Kabupaten Wonogiri pukul 10.30 WIB).

Hal tersebut senada dengan pernyataan petugas parkir (M) berikut:

“...dalam pengelolaan parkir pasar ini saya perannya sebagai juru parkir. Ya tugasnya mengelola agar kendaraan rapi dan menata kendaraan-kendaraan di sekitar area yang menjadi tanggung jawab saya. Jumlah juru parkir sebelum pasar dibangun ada 13 orang dan tidak ada sistem shift dulu. Kalau untuk petugas parkir kebanyakan dari warga sekitar sini mbak. Kalau mengenai kebijakan parkir itu kita menunggu dari dishub karena selalu ada kebijakan baru nanti ada sosialisai dari dishub. Dulu pengelolaan parkir itu pernah diserahkan ke pihak ke tiga (koperasi) lalu sekarang di kelola dibawah dishub lagi mbak. Lokasi parkir masih berada dipinggir jalan (trotoar) dan sering menyebabkan macem karena dekat dengan lampu lalu lintas. Untuk penarikan tarif parkir kita pakai karcis nanti setiap bulan kita setor ke dinas, satu bulan 2 kali setor” (Wawancara pada 9 April 2018 di Pasar Tradisional Baturetno I pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem parkir di Pasar Tradisional Baturetno I merupakan kewenangan



dishub yang diwakilkan oleh petugas parkir. Disperindag hanya bertugas menyediakan tempat saja. Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi lahan parkir di lingkungan pasar sebelum di revitalisasi. Lahan parkir berada pada pinggir jalan raya dan menempati trotoar jalan sehingga dapat dikatakan bahwa Pasar Tradisional Baturetno I belum menyediakan lokasi parkir tersebut. Selain itu, para petugas parkir juga mendapat sosialisai mengenai parkir yang dilakukan oleh dishub.

**e. Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana**

Untuk mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman maka perlu di dukung sarana dan prasarana yang mendukung. Berikut ini adalah fasilitas pendukung yang ada di Pasar Tradisional Baturetno I:

**Tabel 4.9 Sarana dan Prasara Pasar Tradisional Baturetno I**

Sarana dan Prasarana	Pra Revitalisasi	Pasca Revitalisasi
Kantor Pengelola Pasar Tradisional Baturetno I	Ada	Ada
Musala	Ada	Ada
Kamar Mandi	Ada	Ada
Pos Keamanan Pasar	Tidak Ada	Ada
Ruang PPPK (Kesehatan)	Tidak Ada	Ada



Ruang Menyusui (LAKTASI)	Tidak Ada	Ada
Taman	Tidak Ada	Ada
Tempat Sampah	Ada	Ada
TPS	Ada	Ada

*Sumber: Dokumen Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Baturetno*

*I, diolah.*

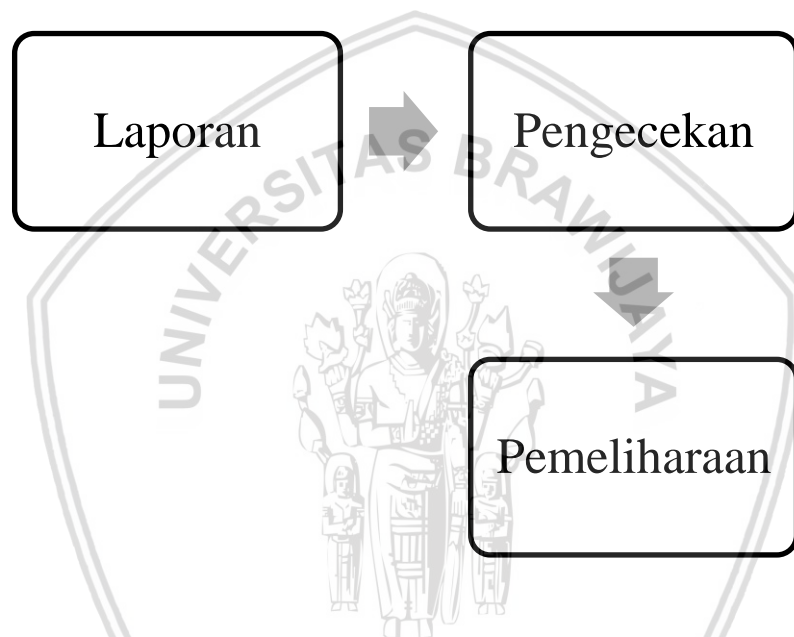
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Pasar Tradisional Baturetno I. Namun, pasca revitalisasi terdapat penambahan sarana dan prasarana yaitu seperti ruang menyusui, pos keamanan pasar, ruang PPPK (kesehatan) dan taman.

Selanjutnya, dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat pada Pasar Tradisional Baturetno I diungkapkan oleh Kepala Bidang Pasar Disperindag Kabupaten Wonogiri (A) berikut:

“Untuk pengelolaan sarana dan prasarana pasar itu sifatnya insidentil saja. Jadi kalau ada laporan, kami cek lokasi lalu kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan. Pengelolaannya tetap disperindag tapi untuk pemeliharaan itu kami tidak bisa melakukan sendiri jadi perlu pihak ketiga untuk melakukannya. Dulu pernah ada kerusakan atap/los (bocor), setelah kami melakukan survey di lokasi lalu kami menghubungi pihak ketiga untuk melakukan perbaikan”. (Wawancara pada 3 April 2018 di Disperindag Kabupaten Wonogiri pukul 10.45 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Tradisional Baturetno I merupakan tanggungjawab disperindag. Dalam pelaksanaannya, disperindag sebagai pengelola sarana dan prasarana menunjuk pihak ketiga yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pemeliharaan yang sifatnya insidentil. Pengelolaan sarana dan prasarana akan dilakukan apabila terdapat laporan dari para pedagang atau pun pengunjung yang mengeluhkan terjadinya kerusakan dan sebagainya. Seperti yang terdapat pada gambar dibawah berikut:



Berdasarkan gambar skema pengelolaan sarana dan prasarana diatas dapat disebutkan bahwa terdapat tiga tahapan, yaitu:

1. Laporan

Laporan mengenai kondisi sarana dan prasarana umumnya dilakukan oleh para pedagang/pengunjung yang memiliki masalah terhadap kondisi fasilitas pasar. Laporan tersebut bisa dilakukan secara individu maupun melalui Paguyuban. Selanjutnya, pengadu dapat menyampaikan masalah sarana dan prasarana kepada pihak pengelola

pasar. Tugas pengelola pasar yaitu membuat laporan kepada disperindag untuk dilakukan tindakan.

## 2. Pengecekan

Tahap kedua yaitu pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang dilaporkan oleh pengelola pasar kepada disperindag. Selanjutnya disperindag melakukan pengecekan ke lokasi ini penting untuk menentukan seberapa parah tingkat kerusakan yang terjadi dan penentuan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

## 3. Pemeliharaan

Setelah proses pengecekan dilakukan dan telah ditentukan solusi untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana maka disperindag menunjuk pihak ketiga yang memiliki keahlian dibidangnya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Baturetno I.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasara Pasar Tradisional Baturetno I merupakan tanggungjawab disperindag. Disperindag melakukan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara insidentil. Selain itu terdapat tiga tahapan dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu, adanya laporan dari pedagang/pengunjung, petugas disperindag melakukan pengecekan, dan terakhir pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2. Kritik dan Keluhan dari *Stakeholders* Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I

Kritik dan keluhan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I muncul akibat adanya sistem pengelolaan pasar yang telah diterapkan tidak sesuai dengan keinginan *stakeholders*. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada *stakeholders* Paguyuban Pedagang Pasar Baturetno (P3B) yang terdiri dari perwakilan-perwakilan pedagang di Pasar Tradisional Baturetno I. Seperti yang diungkapkan oleh ketua paguyuban pasar (S), berikut:

“...dulu sebelum pasar di revitalisasi, pengelolaan kebersihan pasar masih sangat buruk karena kalau hujan pasar becek dan banjir. Kalau untuk kebersihan kamar mandi juga seadanya karena jalan untuk ke kamar mandi masih tanah jadi sering kotor. Selain itu belum ada penataan pedagang sesuai jenis barang yang dijual jadi keadaannya terkesan semrawut. Pedagang juga sering mengeluh masalah pengambilan sampah dari para pedagang di sore hari karena masih ada beberapa sampah yang belum terangkut semua”. (Wawancara pada 9 April 2018 di Pasar Tradisional Baturetno I pukul 13.40 WIB).

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat pedagang Pasar Tradisional Baturetno I (W), berikut:

“...kami masih kesulitan untuk menyampaikan permasalahan terkait sarana dan prasarana karena harus melalui beberapa pihak dahulu. Selain itu masalah kebersihan sampah, tolong kalau bisa petugas yang mengambil sampah dari para pedagang waktunya agak diperpanjang karena ada beberapa pedagang yang tutup agak sore jadi sampahnya tidak ada yang mengangkut kalau petugasnya sudah pulang. Jadi banyak ditemukan sampah saat pasar buka pagi hari.” (Wawancara pada 9 April 2019 di pasar Tradisional Baturetno I pukul 14.05).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pasar yang telah dilakukan selama ini terdapat beberapa

keluhan dari paguyuban pasar yaitu tentang kebersihan pasar, sistem penataan lokasi pedagang, keluhan mengenai penyampaian permasalahan sarana dan prasarana dan waktu pengambilan sampah dari para pedagang.

Kritik dan keluhan terkait pengelolaan pasar pasca revitalisasi pun disampaikan oleh ketua paguyuban pasar (S) sebagai berikut:

“...kondisi fisik pasar sekarang sudah jauh lebih baik dan bagus dari sebelumnya. Kami berharap ada sistem pengelolaan baru juga sehingga meskipun pasar tradisional tetapi dikelola secara semi modern. Saya berharap nanti ada pembaharuan sistem penarikan retribusi jadi sudah tidak perlu menggunakan karcis. Selama ini belum ada denda bagi mereka yang membuang sampah sembarangan jadi kondisi pasar tidak terjaga kebersihannya. Lalu banyak pengunjung yang belum mengetahui lokasi penjual langganannya karena belum tersedianya tulisan keterangan di pasar, baru tulisan yang ditempel saja karena kita baru satu bulan pindah ke pasar baru”. (Wawancara pada 9 April 2018 di Pasar Tradisional Baturetno I pukul 13.50 WIB).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat pengunjung (M) pasar Tradisional Baturetno I berikut:

“Kondisi pasar sekarang jauh lebih bagus, bersih dan rapi tapi saya masih bingung terkait lokasi pedagang karena sudah diterapkan sistem zonasi, mungkin karena baru pindah sekitar satu bulan ya mbak” (Wawancara pada 9 April 2018 di Pasar Tradisional Baturetno I pukul 9.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pasar sudah di revitalisasi namun masih terdapat keluhan dari pada pedagang yang diwaklikan oleh ketua paguyuban pasar seperti penarikan retribusi masih menggunakan karcis, tidak ada denda bagi pembuang sampah sembarangan dan pengunjung yang belum tahu lokasi pedagang langganannya.

### 3. Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi yang dapat dilakukan dalam Perspektif *Capacity Bulding*

Pada penelitian ini, Pengelolaan Pasar Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Bulding* yang dapat penulis rekomendasikan, antara lain:

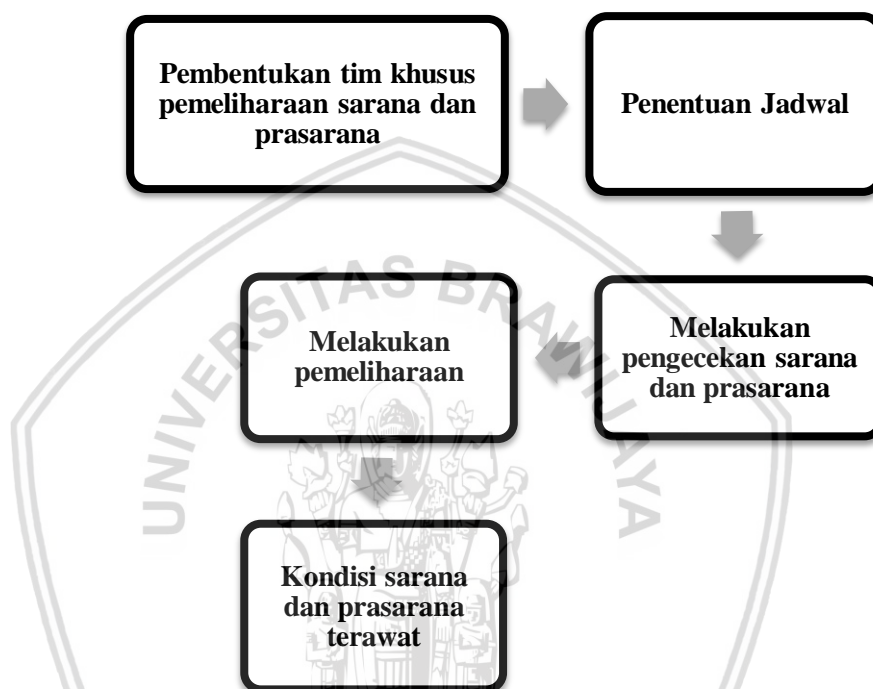
#### a. Pengelolaan Manajemen Pasar

##### 1) Pembentukan Tim Khusus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasca program revitalisasi Pasar Tradisional Baturetno I terdapat penambahan sarana dan prasarana pasar seperti; pos satpam, ruang untuk menyusui (LAKTASI), taman di dalam pasar, ruang kesehatan (PPPK). Disisi lain, kondisi bangunan pasar tentunya berubah semakin lebih baik secara fisik. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pasar menjadi hal penting. Namun, terdapat keluhan-keluhan dari para pedagang mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pasar selama ini.

Pengelolaan sarana dan prasarana khususnya dalam hal pemeliharaan selama ini hanya dilakukan secara insidental. Pemeliharaan hanya dilakukan apabila terjadi kerusakan/ apabila ada laporan dari pedagang kepada pengelola pasar. Sehingga, dalam pengelolaan pasca revitalisasi dapat membentuk tim khusus dan pembuatan jadwal oleh Disperindag untuk melakukan pemeliharaan rutin terkait sarana prasarana dengan pengecekan ke Pasar Tradisional Baturetno I sebulan sekali. Pembentukan tim khusus pemeliharaan

saran dan prasarana tersebut bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki keahlian dalam merawat sarana dan prasarana tempat umum.



**Gambar 4.3 Proses Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

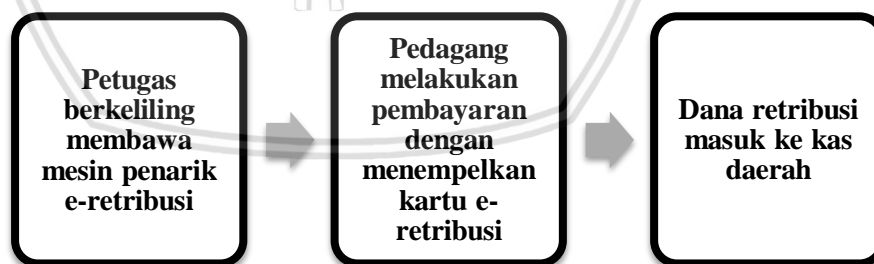
## **2) Penerapan Sistem E-retribusi**

Sistem penarikan retribusi yang dilakukan di Pasar Tradisional Baturetno I selama ini masih menggunakan sistem manual dimana petugas penarik retribusi mendatangi pedagang satu persatu. Sehingga hal tersebut kurang efisien, dengan demikian maka perlu dilakukan reformasi sistem penarikan retribusi yang diharapkan mampu membuat pembayaran retribusi lebih efisien, transparan dan mencegah



penyimpangan. Cara tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya menabung di kalangan pedagang tradisional.

Untuk menerapkan sistem e-retribusi maka perlu melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk. Sehingga pihak bank yang akan mengeluarkan kartu e-retribusi. Dengan adanya inovasi sistem pembayaran retribusi tersebut diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan pedagang. Bagi pemerintah, e-retribusi dapat menghemat biaya operasional dan petugas, karena pihak disperindag tidak perlu mencetak karcis dan pedagang tinggal menempelkan kartu e-retribusi sehingga akan otomatis terdebit. Bagi pedagang, secara tidak langsung akan lebih dekat dengan pihak perbankan sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses permodalan, selain itu akan menjadikan pedagang untuk terbiasa menabung.



**Gambar 4.4 Proses Penarikan Sistem E-Retribusi**

Dengan demikian, e-retribusi adalah solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah secara efisien dan transparan. Selain itu, sistem

pelaporan *real time* dengan sistem online akan mencegah praktik penyimpangan di lapangan karena dilakukan secara professional dimana mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

### **3) Penerapan Sistem Parkir Portal Elektronik Berbasis Komputer**

Sistem pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I masih menggunakan sistem sederhana. Kenyataannya tidak semua pengunjung yang parkir memperoleh karcis, hal ini apabila dibiarkan akan terjadi penyimpangan baik dari petugas parkir atau pun pengunjung yang tidak membayar. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan retribusi pendapatan parkir.

Pasca revitalisasi, lokasi parkir sekarang tersedia di lingkungan pasar. Dengan demikian, untuk melakukan pengelolaan sistem parkir secara professional dan modern maka perlu diterapkan sistem parkir portal elektronik berbasis komputer. Dengan adanya sistem baru tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung pasar serta pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkat.

Pengelolaan sistem parkir merupakan tanggungjawab pengelola parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan (dishub). Untuk mengimplementasikan sistem baru tersebut dishub hendaknya melakukan musyawarah dengan pihak pengelola pasar dan disperindag. Apabila sistem baru tersebut dapat diterapkan, maka akan menghemat

biaya petugas parkir karena petugas parkir di Pasar Tradisional Baturetno I berjumlah 26 orang yang terbagi dalam sistem *shift*.

#### **4) Pemberian Papan Nama yang Menunjukkan Keterangan Lokasi Zonasi**

Penataan zonasi barang dagangan di Pasar Tradisional Baturetno I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti pakaian berada di lantai bawah dan penjual daging di lantai atas. Namun pada kenyataannya belum terdapat papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi, hanya tempelan keterangan yang ditempel pada dinding. Sehingga apabila hal ini dibiarkan maka akan membuat bingung para pengunjung yang nantinya akan berakibat pada sepiunya pengunjung pasar.

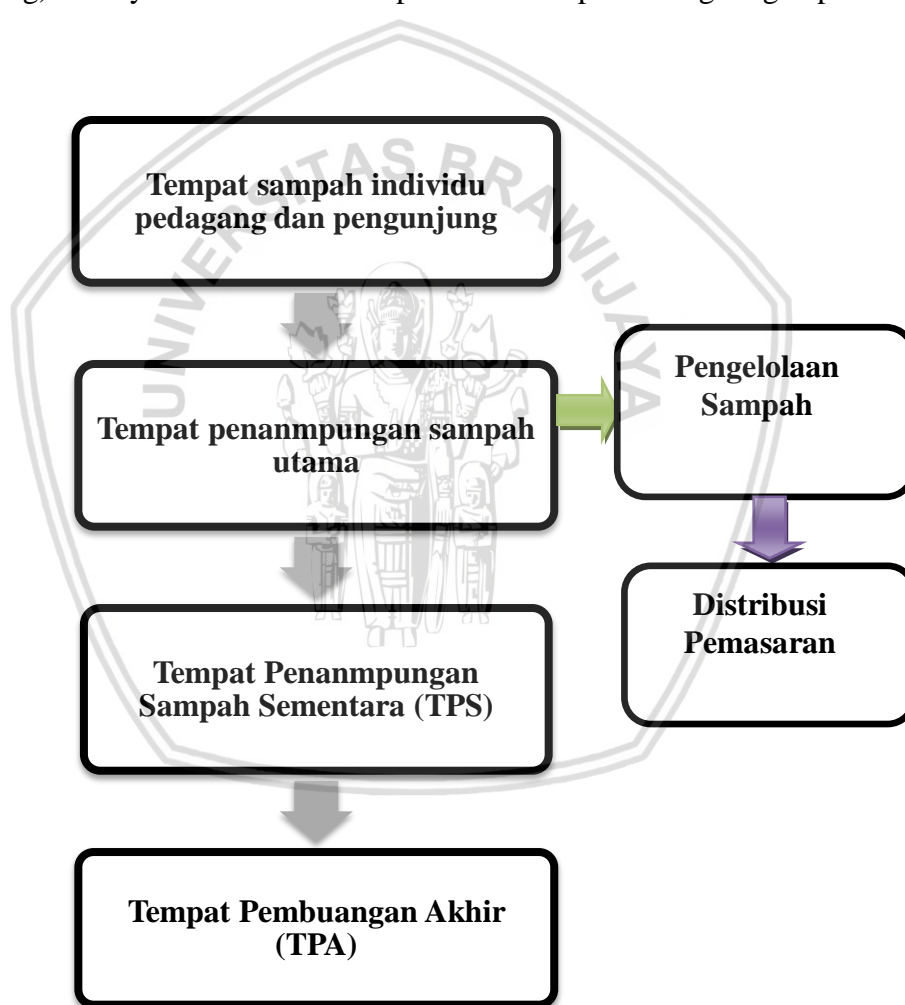
Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak pengelola pasar dapat membuat papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi. Papan-papan tersebut dapat dipasang pada tiap-tiap pintu masuk pasar. Selain hal tersebut, papan nama keterangan lokasi zonasi sebaiknya dipasang pada tiap-tiap tangga sehingga akan memudahkan pengunjung untuk mencari lokasi pedagang yang diinginkan. Sehingga pengunjung akan lebih nyaman untuk berbelanja serta proses berbelanja lebih efektif dengan adanya papan nama keterangan lokasi zonasi yang terpasang.

### 5) Melakukan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R (*reduce reuse, recycle*)

Penangan sampah di Pasar Tradisional Baturetno I masih dalam sebatas pengumpulan pada suatu Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lokasi pasar. Penanganan pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan oleh petugas kebersihan sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan seluruh pihak pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani pengelolaan sampah, antara lain:

- a) Melibatkan *stakeholders* pasar yaitu pengunjung dan pedagang pasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pasar.
- b) Melakukan manajemen pengelolaan sampah dengan baik yaitu dengan cara memishkan sampah *organic* dan sampah *non organic*. Sehingga sampah *organic* dapat langsung didaur ulang.
- c) Mewajibkan para pedagang untuk memiliki tempat sampah pada toko/los masing-masing.
- d) Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mencari solusi alternative dalam memanfaatkan sampah pasar *organic* agar dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual.

- e) Melibatkan paguyuban pedagang pasar dalam pengelolaan sampah pasar, yaitu sebagai pihak pemasar hasil pemanfaatan sampah pasar *organic*.
- f) Melakukan kerjasama dengan pihak lain, yaitu dengan cara mendistribusikan hasil pengelolaan sampah pasar ke toko-toko.
- g) Menyediakan sarana dan prasarana sampah di lingkungan pasar.



**Gambar 4.5 Alur Pengelolaan Sampah Pasar**

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat alternatif pengeloaan sampah antara lain:

1. Produk daur ulang

Yaitu jenis sampah seperti; botol, plastik, kertas, dan lain sebagainya.

## 2. Pupuk organik

Yaitu jenis sampah yang berbasah dari daun-daunan dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik.

## 3. Pakan ternak

Yaitu jenis sampah seperti sisa buah-buahan dan sayur-sayuran.

Sehingga apabila terdapat pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan karena sampah-sampah pasar tersebut dapat dimanfaatkan secara baik. Selain itu hasil dari daur ulang sampah pasar tersebut jika dapat berjalan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan pasar.

Proses pendistribusian produk hasil pemanfaatan sampah tersebut dapat dijual belikan pada koperasi pasar. Sehingga untuk mendukung kelancaran program tersebut maka perlu diadakannya koperasi pasar. Selain sebagai tempat untuk menjual produk daur ulang sampah pasar, koperasi pasar juga dapat digunakan sebagai tempat simpan pinjam pedagang.

## 6) Peningkatan Pelayanan Keamanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan disebutkan setiap jarak 23 meter harus ada APAR. Selain itu disebutkan mengenai kelengkapan lingkungan bangunan gedung, meliputi: hidran, sumur gali atau *reservoir*, dan komunikasi umum. Sehingga pengelola Pasar Tradisional baturetno I hendaknya memperhatikan terkait keamanan pasar dari kebakaran karena pasar tradisional rawan terjadi kebakaran.

Untuk meningkatkan pelayanan keamanan pencegahan dan pemadam kebakaran, maka langkah awal yang dapat dilakukan oleh disperindag, yaitu:

- 1) Melengkapi persyaratan teknis meliputi :
  - (a) Ketentuan Umum
  - (b) Akses dan Pasokan Air untuk Pemadaman Kebakaran  
Lingkungan tersebut di atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya.
  - (c) Sarana Penyelamatan
  - (d) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif
  - (e) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif
  - (f) Utilitas Bangunan Gedung
  - (g) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung
  - (h) Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung
  - (i) Pengawasan dan Pengendalian.
- 2) Menyediakan sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi



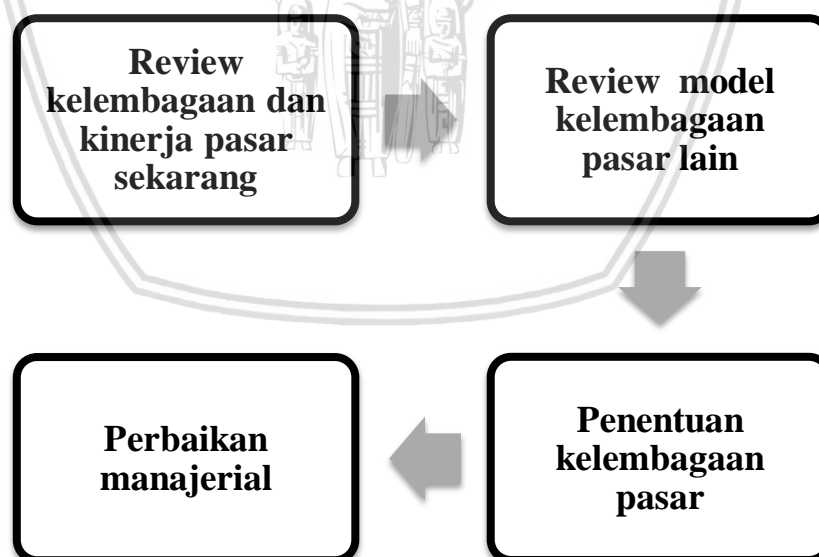
Setiap lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi dengan alat deteksi kebakaran seperti alarm kebakaran dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.

- 3) Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ketentuan;
  - (a) APAR diizinkan untuk diletakkan pada lokasi bagian luar atau lokasi bagian dalam sehingga semua bagian dalam bangunan gedung pada jarak lintasan 23 m ke unit pemadam api.
  - (b) Apabila pertemuan di luar gedung APAR tidak disyaratkan
  - (c) Akses ke APAR harus diizinkan untuk dikunci.
  - (d) APAR hanya diizinkan diletakkan dilokasi staf.
  - (e) Di daerah gudang apabila isi utamanya forklift, truk industri bertenaga, atau operator kereta, maka APAR yang dipasang tetap, seperti ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, tidak dibutuhkan apabila :
    - (1) Menggunakan kendaraan yang dilengkapi APAR yang disetujui OBS
    - (2) Setiap kendaraan dilengkapi dengan alat pemadam api 5 kg, 40A;80B;C, terpasang tetap di kendaraan dengan pengikat yang disetujui oleh manufaktur alat pemadam api atau OBS untuk kendaraan yang digunakan
    - (3) Tidak kurang dari dua buah APAR cadangan yang berdaya padam sama atau lebih besar kapasitasnya tersedia di lapangan untuk penggantian APAR yang sudah terdisemprotka
    - (4) Operator kendaraan terlatih dalam penggunaan APA
    - (5) Pemeriksaan APAR yang terpasang pada kendaraan dilakukan setiap hari. (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*).
- 4) Tersedia peralatan pemadam kebakaran yg cukup dan berfungsi serta tidak kadaluwarsa.
- 5) Tersedia hidran air dengan jumlah cukup menurut ketentuan berlaku.

- 6) Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah penyelamatan diri.
- 7) Adanya petunjuk prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran.  
(Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat).

**b. Menentukan Kelembagaan Pengelolaan Pasar**

Untuk mendukung pengelolaan pasar secara profesional pasca revitalisasi maka perlu melakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dari segi kelembagaan dengan cara melakukan *review* terhadap beberapa kelembagaan pasar lain dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara:



**Gambar 4.6 Proses Penentuan Kelembagaan Pasar**

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menentukan kelembagaan pasar baru, yaitu:

- 1) Melakukan *review* kelembagaan dan kinerja pasar sekarang, hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor manajerial apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pasar selama ini.
- 2) Melakukan kajian terhadap model kelembagaan pasar lain, hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kelembagaan yang ada.
- 3) Penentuan kelembagaan pasar, dalam kaitannya penentuan kelembagaan pasar, maka acuan yang digunakan yaitu hasil dari perbandingan antara kelembagaan pasar saat ini dengan kelembagaan pasar lain.
- 4) Perbaikan manajerial, hal ini dilakukan untuk mendukung kelembagaan pasar yang telah dipilih sehingga faktor-faktor manajerial apa saja yang perlu untuk dilakukan perbaikan untuk mendukung terimplementasikannya kelembagaan pasar baru.

Kelembagaan pasar baru tersebut hanya akan terwujud apabila ada komitmen dari pemimpin dan pengelola Pasar Tradisional Baturetno I dalam meningkatkan kinerja mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemilihan kelembagaan pasar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan.
- b) Melibatkan pihak ketiga (konsultan manajemen).

c) Melakukan kajian secara internal.

**c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar**

Pendapatan pasar selain dari retribusi pasar yang telah ditentukan juga didapat dari penyediaan *space* iklan. Banyak masyarakat yang berkunjung untuk berbelanja di Pasar Tradisional Baturetno I menjadi daya tarik bagi para produsen untuk mempromosikan produknya. Untuk itu, pengelola pasar harus membuat sebuah peraturan untuk melarang bagi siapa saja yang menempatkan sebuah iklan dalam bentuk apa saja di area pasar tanpa seizin pengelola.

Selanjutnya, papan khusus iklan yang telah disediakan diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu, pengelola juga dapat melakukan penawaran kepada pihak lain yang ingin mengiklankan sesuatu. Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi memiliki taman yang dibangun ditengah-tengah pasar, tentunya untuk memaksimalkan hal tersebut, taman pasar dapat dijadikan tempat promosi dari suatu distributor produk. Sehingga apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin maka akan meningkatkan pendapatan.

**d. Mengadakan Pertemuan Secara Rutin Terkait Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I**

Untuk mensosialisasikan program-program pengelolaan baru dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri (disperindag), maka perlu mengadakan pertemuan rutin antar *stakeholders* pasar. Tentunya dengan adanya pertemuan secara rutin disperindag dapat dengan mudah mengetahui keluhan-keluhan terhadap pengelolaan pasar yang telah dilakukan. Selain itu, para pedagang yang juga tergabung dalam paguyuban pasar dapat menyampaikan aspirasi mereka demi peningkatan pengelolaan pasar.

Bentuk kegiatan tersebut seperti acara kerja bakti, rapat, dan *workshop*. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana terdapat pertemuan antar *stakeholders* pasar sehingga akan menciptakan masukan-masukan dari para seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting karena melalui pertemuan rutin, pemimpin dapat menyampaikan secara langsung kepada pedagang mengenai peningkatan pemberian layanan kepada pengunjung yang dilakukan secara personal.

**e. Peningkatan Pengetahuan Dasar Bagi Para Pedagang**

Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang di Pasar Tradisional Baturetno I cukup penting untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar para pedagang dapat mengelola barang dagangan dan sistem keuangan mereka sehingga dapat mengetahui laju pengeluaran

dan pemasukan pendapatan. Untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi para pedagang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1) Pelatihan administrasi pembukuan

yaitu tata cara pencatatan transaksi keuangan dan dapat dengan mudah melakukan analisa keuangan.

2) Pelatihan strategi penjualan

terutama pengaturan barang dagangan (*display*), pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi serta transaksi yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual.

3) Sistem stok dan *delivery*

yaitu tidak terjadinya penumpukan jika terjadi penurunan permintaan serta tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat

**f. Reformasi Peraturan**

Dalam sebuah organisasi terdapat peraturan yang digunakan untuk mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Pada Pasar Tradisional Baturetno I, khususnya dalam hal kebersihan pemungutan sampah yang dilakukan sekali sehari yaitu pada pukul 14.00 dan biasanya berakhir pada pukul 17.00 mendapat komplain dari para pedagang. Hal itu terjadi karena terdapat beberapa pedagang yang masih belum menutup toko sehingga sampah mereka tidak ada yang mengambil.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya dapat diatasi yaitu dengan membuat peraturan baru dimana kegiatan membersihkan sampah oleh *cleaning service* dilakukan dua kali pada pagi hari dan sore hari sehingga kebersihan pasar senantiasa akan tetap terjaga. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam hal kebersihan sehingga tidak didapati pedagang yang mengeluh tentang masalah tersebut.

Selama ini belum diterapkan sistem *punishment* dan *reward* bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang serius karena baik pedagang maupun pengunjung bebas untuk membuang sampah sembarangan dan tidak ditempat yang telah disediakan. Dengan demikian, maka perlu diberlakukan sistem denda bagi mereka yang membuang sampah sembarangan di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I. Sehingga para pedagang dan pengunjung akan berfikir ulang apabila akan membuang sampah sembarangan. Hal tersebut akan mendorong para pedagang dan pengunjung pasar untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah dipisahkan baik *organic* maupun *non organic*. Selain itu, apabila pemisahan sampah dapat dilakukan dengan baik akan menjadikan lingkungan pasar bersih dari sampah.

**g. Pengadaan Fasilitas Umum**

**1) CCTV**



Penggunaan CCTV pada Pasar Tradisional Baturetno I pasca revitalisasi perlu untuk dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan lingkungan pasar serta untuk mengawasi aktivitas yang terjadi di pasar. Selain itu penggunaan CCTV juga dapat memantau kegiatan di tempat parkir sehingga keamanan lokasi parkir akan semakin meningkat.

Berdasarkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
- (b) Pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar.
- (c) Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

## **2) Ruang Bersama**

Tersedianya ruang bersama dapat digunakan untuk pertemuan rutin antar *stakeholders* pasar. Selain itu, dengan adanya ruang bersama dapat digunakan oleh paguyuban pasar untuk kegiatan musyawarah. Selama ini pertemuan anggota *stakeholders* dilakukan diluar pasar, sehingga apabila tersedia ruang pasar maka akan dapat memanfaatkan pasar untuk kepentingan bersama.

## **3) Sarana Telekomunikasi**

Sarana telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola. Hal ini perlu mengingat sarana telekomunikasi yang berada di kantor pengelola Pasar

Tradisional Baturetno I dalam kondisi tidak terhubung (mati) sehingga penting untuk menyediakan sarana komunikasi apabila ada pihak yang ingin memasang iklan di area pasar.

#### **4) Koperasi Pasar**

Koperasi pasar memang tak terpisahkan dari keberadaan pasar itu sendiri. Ibaratnya antara pasar dan koperasi pasar seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi dan menyokong satu sama lain. Kegiatan di pasar akan semakin produktif dan berdaya jika para pedagang atau penyedia jasa di pasar aktif mengelola dan menjual produknya kepada pembeli. Jika para pedagang memiliki permasalahan dalam hal modal atau kebutuhan barang yang tak tersedia, di situlah koperasi pasar menjadi penyokong.

Disisi lain, koperasi pasar dapat digunakan sebagai sarana untuk menukarkan uang baru, sehingga pedagang di Pasar Tradisional Baturetno I tidak perlu menukarkan uang kepihak penjual uang dimana biasanya nilai dari uang asli akan terpotong. Koperasi pasar juga dapat digunakan untuk menjual produk daur ulang dari sampah yang telah dikelola, dengan demikian akan meningkatkan pemanfaatan pasar secara maksimal.

#### **h. Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kelembagaan eksternal yang tidak berada di pasar, melainkan terlibat dalam mendukung proses dan prosedur yang berjalan di lingkungan pasar.

Pasar tradisional yang dikelola oleh BUMD dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan pelayanan, baik kepada pedagang mau pun konsumen (pengunjung) pasar. Dengan demikian, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneurship* diatas kepentingan masyarakat banyak. Sehingga akan tercipta suatu pengelolaan pasar yang profesional, modern, dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi dasar dalam pembentukan atau pun pelaksanaan BUMD. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan mengenai;

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 2) Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- 3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- 4) Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Dengan demikian apabila pasar dikelola oleh BUMD diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pasar yang terintegritas antara satu dengan yang lainnya. Apabila hal tersebut dapat tercapai maka

akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pra Revitalisasi yang Telah Dilakukan**

###### **a. Sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar**

Pada pengelolaan sistem penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I masih dilakukan dengan cara manual. Terdapat tiga tahapan pengelolaan retribusi; *pertama*, kegiatan penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I menggunakan sistem jemput langsung dimana petugas mendatangi pedagang untuk menarik tagihan retribusi setiap hari dan pedagang melakukan pembayaran retribusi ditempat dengan tanda bukti penyerahan karcis dari petugas.

*Ke dua*, kegiatan penyeteroran retribusi dilakukan setiap hari setelah petugas selesai melakukan penarikan retribusi kecuali hari libur Sabtu dan Minggu. Penyeteroran hasil retribusi disetorkan ke kantor kas daerah yaitu BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 13.00. Sebelum hasil retribusi disetorkan ke BPD, terlebih dulu petugas menghitung hasil pendapatan retribusi di ruang kantor pengelola pasar. Setelah proses penyeteroran dilakukan biasanya penarik retribusi akan mendapat Surat Tanda Setoran.

*Ke tiga*, yaitu pelaporan retribusi, pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelaporan pendapatan hasil retribusi kepada Disperindag

yaitu BPD. Dalam hal ini, BPD sepenuhnya bertanggungjawab membuat rekapan hasil retribusi pada hari itu dalam bentuk laporan ke Disperindag. Pelaporan hasil setoran retribusi dilakukan setiap hari pada sore hari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem penarikan retribusi di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I masih menggunakan sistem manual. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu efisiensi dan efektivitas.

#### **b. Sistem keamanan dan ketertiban**

Pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban pasar, pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasar yaitu satpam pasar. Satpam pasar yang terdapat pada Pasar Tradisional Baturetno I sebelum di revitalisasi yaitu berjumlah 4 orang. Tugas satpam pasar yaitu menjaga keamanan lingkungan pasar dengan cara melakukan pengecekan pasar setiap 3 jam sekali. Selain itu mereka bekerja berdasarkan sistem *shift* yang disetujui oleh keputusan antar satpam pasar. Mereka menjaga keaman dan keteriban pasar setiap hari yaitu pada shif pagi dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00 sedangkan untuk *shift* malam yaitu pukul 17.00 sampai dengan pukul 05.00.

#### **c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah**

Pengelolaan kebersihan Pasar Tradisional Baturetno I dapat dilihat dari petugas kebersihan yang mengumpulkan dan membawa sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan petugas yang

menjaga dan membersihkan toilet umum/ kamar mandi di Pasar Tradisional Baturetno I. Terdapat beberapa proses penanganan kebersihan sampah yang dilakukan di Pasar Tradisional Baturetno I yaitu dimulai dari penyediaan tempah sampah di lingkungan pasar sampai penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

*Pertama*, kegiatan mengumpulkan sampah dimulai dari petugas yang berkeliling membersihkan sampah dari para pedagang. Petugas kebersihan/*cleaning service* membersihkan pasar pada pukul 14.00 dan biasanya berakhir pada pukul 17.00. *Ke dua*, setelah semua sampah dari para pedagang terkumpul maka petugas membawa dan membuang sampah yang terkumpul ke TPS. *Ke tiga*, kegiatan pembuangan sampah ke TPA. Dalam proses terakhir, pihak yang bertugas mengangkut sampah dari TPS ke TPA ialah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem penanganan sampah di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I masih belum menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycyle*). Pengelolaan sampah yang dilakukan belum menerapkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat mengenai syarat pengelolaan sampah, yaitu;

- 1) Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- 2) Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
- 3) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik.
- 4) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup.
- 5) Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.



- 6) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
- 7) Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- 8) Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang.
- 9) Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.
- 10) Terdapat kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle* (misalnya bank sampah, pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi.

Sehingga apabila dilihat dari karakteristik administrasi pembangunan yaitu pembangunan harus dilakukan dengan berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*) maka dalam hal penanganan sampah di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I belum menerapkan hal tersebut. Dengan demikian, dalam upaya pembangunan kondisi lingkungan penting untuk menjaga keberlangsungan dari suatu keadaan.

Selanjutnya dalam hal kebersihan toilet umum/kamar mandi dilakukan oleh pengelola toilet umum yang telah ditunjuk oleh pengelola pasar. Sehingga kebersihan toilet umum sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola toilet umum dibawah naungan pengelola pasar. Dengan demikian, selain membersihkan toilet umum setiap hari yaitu saat setelah ada pengunjung yang menggunakan toilet pengelola kebersihan wajib untuk membayar retribusi hasil penggunaan toilet umum sebesar Rp., 350.000, setiap hari ke pengelola. Terdapat persyaratan dalam penyediaan



toilet umum/kamar mandi berdasarkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, antara lain;

- 1) Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol.
- 2) Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari tempat penjualan.
- 3) Pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
- 4) Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
- 5) Penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik
- 6) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
- 7) Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
- 8) Lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan.
- 9) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

Berdasarkan persyaratan mengenai penyediaan toilet umum/kamar mandi di lingkungan pasar maka hal tersebut sudah sesuai dengan pengelolaan toilet umum/kamar mandi di Pasar Tradisional Baturetno I seperti pemberian simbol laki-laki dan perempuan. Namun kondisi kebersihan toilet umum/kamar mandi kurang terjaga karena kondisi pasar yang masih berdasarkan tanah sehingga sering meninggalkan bekas saat ke kamar mandi. Kondisi tersebut dapat teratasi pasca pasar di revitalisasi sehingga tercipta peningkatan kebersihan toilet umum/kamar mandi.

#### **d. Sistem parkir**

Sistem pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Baturetno I dilakukan oleh pengelola parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan (dishub). Berdasarkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.

- 2) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- 3) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- 4) Area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.
- 5) Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

Lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I selama ini pihak pasar tidak menyediakan lokasi parkir. Hal tersebut didukung dengan keadaan lokasi parkir yang berada di sepanjang jalan/ trotoar pasar sehingga sering menyebabkan kemacetan dan mengganggu laju kendaraan. Apabila mengacu pada SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, seharusnya pasar memiliki lahan parkir untuk pengunjung pasar. Namun dengan adanya program revitalisasi, pasar saat ini sudah disediakan lokasi parkir meski pengelolaan parkir merupakan tanggungjawab dishub.

#### **e. Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana**

Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan untuk mendukung keberlangsungan pasar dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dengan kondisi yang baik. Namun, dalam pengelolaannya selama ini belum dilakukan secara rutin yang disebabkan karena sifatnya hanya insidental saja. Sehingga kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I dapat dikatakan kurang terawat.

Pengelolaan sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Baturetno I merupakan tanggungjawab disperindag. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa terdapat proses yang panjang untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana apabila terjadi kerusakan. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dilihat dari konsep *governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga *private sector* dan masyarakat madani tercermin dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan (Kurnia, 2014:319) sudah sesuai yang tercermin dalam tiga tahapan dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu, adanya laporan dari pedagang/pengunjung, petugas disperindag melakukan pengecekan, dan terakhir pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Namun jika dilihat dari prinsip *good governance* daya tanggap maka hal tersebut belum terwujud karena pemerintah hanya akan melakukan perawatan sarana dan prasarana apabila ada laporan dari pedagang.

## **2. Kritik dan Keluhan dari *Stakeholders* Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I**

Pada pengelolaan pasar yang telah dilakukan selama ini ternyata masih mendapat kritik atau pun keluhan dari para pedagang dan pengunjung pasar. Pedagang mengeluhkan sistem pengelolaan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang atau pun ketua paguyuban pasar, mereka mengungkapkan bahwa terdapat beberapa sistem pengelolaan pasar yang hendaknya mendapat perhatian lebih. *Pertama*, masalah kebersihan dan penanganan sampah

dimana pedagang mengeluhkan kondisi lantai toilet umum/kamar mandi yang sering kotor akibat bekas kaki pengunjung. Selain itu mengenai waktu pengambilan sampah yang dilakukan oleh petugas terlalu singkat sehingga masih menyisakan sampah pada pagi hari sehingga kondisi tersebut mengganggu pedagang yang berjualan di pagi hari.

*Ke dua*, yaitu kondisi pasar yang semrawut hal ini dapat dilihat dari posisi pedagang berjualan yang belum ditata sesuai dengan sistem zonasi. *Ke tiga*, yaitu mengenai masalah penanganan sarana dan prasarana pasar, seperti yang diketahui bahwa pengelola kurang memiliki daya tanggap terhadap perawatan atau pun perbaikan sarana dan prasarana sehingga pedagang harus melalui proses yang panjang sebelum kerusakan sarana dan prasarana ditanggapi oleh pengelola.

Setelah proses revitalisasi selesai dan pedagang kini telah menempati bangunan baru, masih terdapat beberapa kritik terhadap pengelolaan pasar seperti yang disampaikan oleh ketua paguyuban pasar. Kritik tersebut yaitu mengenai sistem penarikan retribusi yang dirasa kurang efisien jika masih menggunakan karcis, belum adanya sistem denda bagi pedagang atau pun pengunjung yang membuang sampah sembarangan di lingkungan pasar sehingga kebersihan pasar kurang terjaga. Dari pihak pengunjung mengungkapkan bahwa mereka masih kesulitan untuk menemukan lokasi berjualan pedagang langganannya karena belum hafal mengenai pembagian zonasi pedagang hal itu

disebabkan karena tidak adanya keterangan yang digunakan secara jelas hanya sekedar tempelan keterangan di dinding pasar.

Dengan demikian, dengan adanya keluhan atau pun kritik dari para pedagang dan pengunjung pasar menjadi dorongan untuk melakukan suatu reformasi terhadap pengelolaan pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Caiden dalam Zauhar (2007:6) reformasi administrasi merupakan dorongan untuk membuat perubahan administrative dalam klausul ini memberikan suatu pemahaman bahwa perubahan administratif itu dapat dilakukan apabila berangkat dari suatu niat sadar dan sengaja. Jika perubahan itu dilandasi oleh nalar yang sadar dan sengaja, maka jelas bahwa perubahan itu terjadi dalam proses yang terencana. Sehingga reformasi pengelolaan pasar diperlukan untuk memperbaiki kinerja administrative individu-individu, kelompok, dan institusi serta menuntut bagaimana mereka dapat mencapai tujuan-tujuan kegiatan mereka dengan lebih efektif, lebih ekonomis dan lebih cepat.

### **3. Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi yang dapat dilakukan dalam Perspektif *Capacity Bulding***

Pengelolaan pasar pasca revitalisasi pada Pasar Tradisional Baturetno I dalam perspektif *capacity building* diperlukan untuk mendorong profesionalisasi pengelolaan aset pasar, sehingga perlu dilakukan reformasi pengelolaan pasar pasca revitalisasi secara profesional dan modern. Reformasi sendiri memiliki arti yaitu suatu proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata

kepemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2009: 67). Sehingga dengan adanya reformasi pengelolaan pasar dalam perspektif *capacity building* dapat menciptakan suatu sistem tata pengelolaan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terlibatnya berbagai *stakeholders* dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar merupakan prinsip dari *good governance*. Pengelolaan pasar yang menggunakan prinsip *good governance* dengan pendekatan *capacity building* berarti melakukan pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang sudah ada secara lebih baik, efektif dan efisien dengan pengelolaan pasar yang terintegrasi. Disamping itu, *capacity building* merupakan suatu proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*), seperti membentuk unit-unit yang belum ada dalam mendukung pengelolaan pasar yang diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pasar.

Menurut Milen (2006:36) terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*), antara lain: 1) proses yang berkelanjutan, 2) keterlibatan semua pihak (tingkat), 3) keterlibatan *stakeholders*, dan 4) dilakukan secara bertahap. Selain itu terdapat faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5



(lima) hal pokok yaitu; komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga dalam penelitian ini Pengelolaan Pasar Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif *Capacity Bulding* yang dapat penulis rekomendasikan secara singkat, antara lain:

1) Strategi Pengelolaan Pasar jangka Pendek

a. Pengelolaan Manajemen Pasar

1. Pembentukan Tim Khusus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Pembentukan tim khusus tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang ahli dalam menangani urusan sarana dan prasarana umum. Sehingga akan menciptakan keterlibatan *stakeholder* sebagaimana dalam keseluruhan proses penguatan kapasitas, juga dalam identifikasi kesenjangan kapasitas, semua *stakeholders* perlu dilibatkan. Analisa *stakeholders* dapat dilakukan untuk menentukan siapa yang harus terlibat, peran-perannya, akuntabilitas, tanggung jawab, dan besarnya keterlibatan.

2. Penerapan Sistem *E-retribusi*

Penerapan e-retribusi adalah solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah secara efisien dan transparan. Selain itu, sistem pelaporan dengan sistem online akan mencegah praktik penyimpangan di lapangan karena dilakukan secara profesional dimana mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat



dengan biaya terjangkau. Sehingga untuk mewujudkan sistem e-retribusi dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* pasar.

### 3. Penerapan Sistem Parkir Portal Elektronik Berbasis Komputer

Pengelolaan sistem parkir secara profesional dan modern maka perlu diterapkan sistem parkir portal elektronik berbasis komputer. Dengan adanya sistem baru tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung pasar serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat dilakukan secara bertahap.

### 4. Pemberian Papan Nama yang Menunjukkan Keterangan Lokasi Zonasi

Pihak pengelola pasar dapat membuat papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi yang dipasang pada tiap pintu masuk dan keterangan nama yang terpasang pada tiap tangga. Sehingga pengunjung akan lebih nyaman untuk berbelanja serta proses berbelanja lebih efektif dengan adanya papan nama keterangan lokasi zonasi yang terpasang.

### 5. Melakukan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R (*reduce reuse, recycle*)

Pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) merupakan proses yang berkelanjutan. Proses tersebut mencakup upaya mendukung pengambilan keputusan,

meninjau kembali serta merancang kembali sehingga akan tercipta suatu sistem pengelolaan sampah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

6. Peningkatan Pelayanan Keamanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Dalam upaya peningkatan pelayanan keamanan pencegahan dan pemadam kebakaran tentunya membutuhkan kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi.

b. Menentukan Kelembagaan Pengelolaan Pasar

Penentuan kelembagaan pengelolaan pasar perlu melakukan *review* terhadap kekuatan dan kelemahan pengelolaan pasar selama ini. Kelembagaan pasar baru tersebut hanya akan terwujud apabila ada komitmen dari pemimpin dan pengelola Pasar Tradisional Baturetno I dalam meningkatkan kinerja mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Memaksimalkan pendapatan pasar dapat dilakukan dengan adanya komitmen bersama antara para pengelola pasar. Hal tersebut seperti memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pasar, misalnya dengan membuat peraturan untuk tidak menenpel

lembaran promosi pada dinding pasar dan menyediakan tempat khusus untuk iklan serta memanfaatkan taman pasar untuk kegiatan promosi produk dari distributor.

d. Mengadakan Pertemuan Secara Rutin Terkait Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I

Tujuan dari mengadakan pertemuan secara rutin yaitu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana terdapat pertemuan antar *stakeholders* pasar sehingga akan menciptakan masukan-masukan dari para seluruh pihak yang terlibat. Keterlibatan semua pihak (tingkat) merupakan salah satu prinsip *capacity building*. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting karena melalui pertemuan rutin, pemimpin dapat menyampaikan secara langsung kepada pedagang mengenai kebijakan pengelolaan secara personal.

e. Peningkatan Pengetahuan Dasar Bagi Para Pedagang

Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang di Pasar Tradisional Baturetno I dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip *capacity building*. Seperti mengadakan pelatihan administrasi pembukuan, pelatihan strategi penjualan dan sistem stok dan *delivery* barang.

f. Reformasi Peraturan

Reformasi peraturan dalam pengelolaan pasar mutlak dilakukan agar menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih baik. Seperti

dalam hal penanganan sampah yaitu membuat peraturan baru untuk kebersihan sampah pasar dilakukan dua kali pada pagi dan sore sehingga kebersihan pasar senantiasa akan tetap terjaga. Selama ini belum diterapkan sistem *punishment* bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Dengan demikian dapat membuat peraturan baru mengenai sanksi atau denda bagi pembuang sampah sembarangan. Selain itu melakukan peraturan pemisahan sampah organik dan *non* organik bagi pengunjung dan pedagang pasar.

g. Pengadaan Fasilitas Umum

- 1) CCTV
- 2) Ruang Bersama
- 3) Sarana Telekomunikasi
- 4) Koperasi Pasar

2) Strategi Pengelolaan Pasar Jangka Panjang

Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengelolaan pasar oleh BUMD diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pasar yang terintegritas antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dengan adanya pengelolaan pasar oleh BUMD merupakan salah satu prinsip yang *capacity building* yaitu reformasi kelembagaan eksternal pasar. Apabila hal tersebut dapat tercapai maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan dalam memberikan pelayanan.

**Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian**

Rumusan Masalah Penelitian			
Aspek yang Diteliti (Fokus)	Pengelolaan Pra Revitalisasi	Hambatan	Rekomendasi Pengelolaan Pasca Revitalisasi
Sistem penarikan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menggunakan sistem manual</li> <li>-Penggunaan karcis</li> <li>-Terdiri dari 3 proses:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penarikan</li> <li>2) Penyetoran</li> <li>3) Pelaporan</li> </ol> </li> </ul>	Transparasi, efisiensi dan efektivitas, sulit tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penerapan sistem E-retribusi</li> <li>-Proses penarikan, penyetoran sampai pelaporan hanya dilakukan sekali datang sehingga akan meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas</li> </ul>
Sistem keamanan dan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terdapat satpam pasar yang bertugas menjaga keamanan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidak ada pos satpam</li> <li>-Minim fasilitas keamanan dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penambahan fasilitas CCTV pada pasar</li> <li>- Peningkatan pelayanan keamanan</li> </ul>

	ketertiban pasar	kebakaran	pencegahan dan pemadam kebakaran
Sistem kebersihan dan penanganan sampah	<p>-Terdapat 3 proses mengenai penanganan sampah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengumpulan sampah</li> <li>2) Pembuangan sampah ke TPS</li> <li>3) Pembuangan sampah ke TPA</li> </ol> <p>-Belum menerapkan pengelolaan limbah sampah berdasarkan konsep 3R</p> <p>-Terdapat 2 kamar mandi</p>	<p>- Masih banyak pedagang/ pengunjung yang membuang sampah sembarangan</p> <p>- Lantai kamar mandi sering kotor</p> <p>-Terdapat sampah di pagi hari</p>	<p>-Melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)</p> <p>-Melakukan pemisahan sampah organik dan <i>non</i> organik</p> <p>-Menjual hasil daur ulang sampah di koperasi pasar yang dapat dibentuk</p> <p>-Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal daur ulang sampah pasar dan toko-toko dalam hal penjualan</p> <p>-Reformasi</p>

			<p>peraturan jam kerja petugas kebersihan pasar; yaitu menjadi pagi dan sore</p> <p>-Menerapkan sistem denda bagi yang membuang sampah sembarangan</p>
Sistem perparkiran	<p>-Dikelola oleh dishub</p> <p>-Terdapat petugas parkir yang bertugas menjaga dan menata kendaraan</p>	<p>-Belum memiliki lokasi parkir resmi</p> <p>-Tidak menggunakan karcis apabila pengunjung tidak meminta</p> <p>-Sering menyebabkan macet jalan/trotoar</p>	<p>- Penerapan sistem parkir portal elektronik berbasis komputer pada lokasi parkir yang disediakan di lingkungan pasar</p>
Sistem pemeliharaan sarana dan	-Terdapat beberapa proses:	-Pedagang kesulitan untuk membuat	-Pembentukan tim khusus pemeliharaan sarana



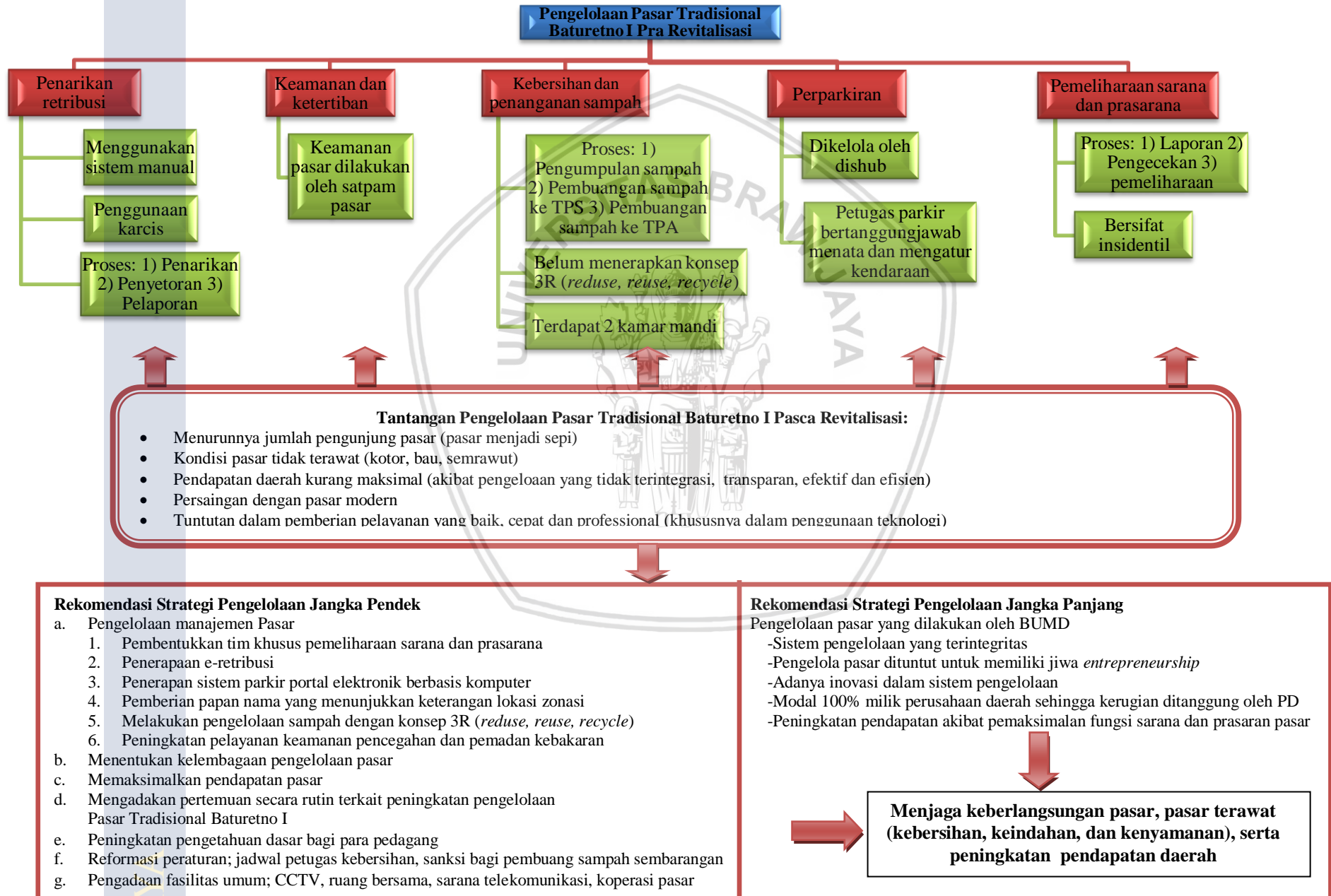
sarana	1)Laporan 2)Pengecekan 3)Pemeliharaan -Bersifat Insidentil	laporan -Memerlukan waktu lama untuk perbaikan	dan prasarana;; 1) Melakukan pengecekan sarana dan prasarana 2) Sarana dan prasarana terawatt, sehingga tercipta responsivitas -Penambahan fasilitas sarana: 1) CCTV 2) Ruang Bersama 3) Sarana Telekomunikasi 4) Koperasi Pasar
			- Pemberian papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi - Menentukan kelembagaan

			<p>pengelolaan pasar (internal) dengan cara melakukan <i>review</i> terhadap pengelolaan pasar lain</p> <p>- Memaksimalkan pendapatan pasar dengan cara menyediakan <i>space</i> iklan dan memanfaatkan fungsi taman sebagai tempat promosi distributor produk</p> <p>- Mengadakan pertemuan secara rutin terkait peningkatan pengelolaan pasar tradisional</p> <p>Baturetno I</p>
--	--	--	--

			- Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang -Strategi Jangka Panjang; Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan pasar Tradisional Baturetno I yang dilakukan selama ini masih menggunakan sistem tradisional. Sehingga, dengan adanya revitalisasi maka diharapkan pengelolaan pasar menjadi lebih baik, profesional dan modern. Dengan demikian, peneliti melakukan kajian untuk mengetahui pengelolaan pasar yang telah dilakukan pasca revitalisasi sehingga memunculkan rekomendasi alternatif pengelolaan pasar baru. Strategi pengelolaan pasar yang dapat peneliti rekomendasikan terbagi menjadi dua, yaitu strategi jangka pendek yang terdiri dari peningkatan pemberian pelayanan dan pengelolaan manajemen dan strategi jangka panjang yaitu pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga dengan adanya pengelolaan pasar secara profesional dapat menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar, serta untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri dan meningkatkan pendapatan daerah.

#### 4.7 Matrik Ringkasan Hasil Penelitian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi yang telah dilakukan selama ini masih menggunakan sistem tradisional dan belum mengacu pada pengelolaan pasar yang modern. Pernyataan tersebut didasarkan pada sistem pengelolaan pasar dilihat dari:
  - a. Sistem penarikan retribusi pasar yang dilakukan apabila dilihat dari teori *good governance*, maka telah tercipta kerjasama/sinergi antar aktor yaitu dari pemerintah (disperindag), pengelola pasar dan swasta (pedagang). Namun, dalam pelaksanaannya masih belum menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, efisiensi dan efektifitas, hal tersebut dapat dilihat dari sistem penarikan retribusi yang masih menggunakan sistem manual. Petugas retribusi melakukan penarikan retribusi setiap hari kepada pedagang secara langsung dengan menggunakan karcis selanjutnya petugas menghitung hasil retribusi tersebut sebelum disetorkan ke BPD.
  - b. Sistem keamanan dan ketertiban pasar dilakukan oleh satpam pasar dimana mereka melakukan tugas dengan sistem *shift*. Selain itu petugas keamanan dan ketertiban belum melakukan tugasnya secara maksimal, mereka hanya bertugas untuk melakukan keamanan pasa

dan belum melakukan tugas dalam menertibkan pasar hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang dan pengunjung yang dibiarkan saja ketika membuang sampah sembarangan. Sehingga apabila dilihat dari prinsip *good governance* yaitu daya tanggap maka petugas keamanan belum melakukan tugasnya secara maksimal. Selain itu keteriban pasar bekerjasama dengan polres setempat untuk mengamankan pasar dan disperindag rutin melakukan sosialisasi terhadap petugas satpam setiap 1 tahun sekali.

c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah pasar dibagi menjadi sistem kebersihan dalam hal penanganan sampah dilingkungan pasar dan sistem kebersihan toilet umum/kamar mandi. Sistem pengelolaan penanganan sampah dilakukan dengan melibatkan pedagang, pengunjung, petugas kebersihan/*cleaning service* dan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga apabila dilihat dari teori *good governance* sudah terdapat kerjasama dan partisipasi dari *stakeholders* pasar. Namun, penanganan sampah masih belum menerapkan prinsip *good governance* yaitu berwawasan ke depan hal ini dilihat dari belum adanya pengelolaan limbah sampah dan pemisahan sampah secara organik/ non organik.

Pengelolaan kebersihan toilet umum/kamar mandi menjadi tanggungjawab pengelola pasar dengan menunjuk petugas pengelola kebersihan toilet umum/kamar mandi untuk menjaga kebersihan toilet umum di lingkungan pasar.

d. Sistem perparkiran di lingkungan pasar dilakukan oleh pengelola parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan (dishub). Pengelola pasar tidak bertanggungjawab mengenai sistem perparkiran namun hanya bertugas untuk menyediakan tempat parkir. Pada kenyataannya, Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi belum memiliki tempat parkir sehingga pengunjung pasar biasanya memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan/trotoar pasar dan sering menyebabkan macet. Selain itu petugas parkir tidak memberikan karcis retribusi parkir apabila pengunjung tidak meminta. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi sehingga rawan terjadi penyelewengan.

e. Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana pasar merupakan tanggungjawab Disperindag, dalam hal ini disperindag melibatkan seluruh pihak pasar. Pedagang/pengunjung pasar melakukan laporan kepada pengelola pasar untuk menyampaikan kepada disperindag. Selanjutnya, disperindag akan melibatkan pihak ke tiga dalam hal pemeliharaan sarana dan sarana. Sehingga apabila dilihat dari teori *good governance*, terdapat pelibatan antar aktor dalam pemeliharaan sarana dan prasarana namun belum menerapkan prinsip daya tanggap karena pemeliharaan sarana dan prasarana bersifat insidentil

2. Terdapat kritik dan keluhan terhadap pengelolaan pasar baik pengelolaan pasar pra revitalisasi dan pasca revitalisasi yang telah dilakukan. Keluhan tersebut muncul dari *stakeholders* pasar yaitu



pedagang yang mengeluhkan jam operasional petugas kebersihan pasar yang selesai sebelum pedagang pulang sehingga masih ditemukan sampah pada keesokan hari. Selain itu, kritik dari pedagang mengenai penanganan sarana dan prasarana membutuhkan proses yang panjang, dimulai dari melakukan laporan sampai pemeliharaan dilakukan. Keluhan lain yang muncul disampaikan oleh ketua paguyuban pasar yaitu belum adanya sistem denda mengenai kebersihan pasar sehingga masih terdapat pedagang dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Keluhan lain yang muncul pasca revitalisasi dari pengunjung pasar yaitu mengenai sistem pembagian zonasi lokasi pedagang sehingga pengunjung masih bingung mencari pedagang langgananya karena belum ada papan keterangan.

3. Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I pra revitalisasi yang telah dilakukan selama ini masih menggunakan sistem tradisional bahkan pasca revitalisasi pengelolaan pasar dapat dikatakan masih cenderung sama dengan sebelumnya. Dengan demikian, peneliti melakukan kajian untuk mengetahui pengelolaan pasar yang telah dilakukan pasca revitalisasi sehingga memunculkan rekomendasi alternatif pengelolaan pasar baru. Strategi pengelolaan pasar yang dapat peneliti rekomendasikan dalam perspektif *capacity building* antara lain:

- a. Pengelolaan Manajemen Pasar

- 1) Pembentukan Tim Khusus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

- 2) Penerapan Sistem E-Retribusi
  - 3) Penerapan Sistem Parkir Portal Elektronik Berbasis Komputer
  - 4) Pemberian Papan Nama yang Menunjukkan Keterangan Lokasi Zonasi
  - 5) Melakukan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R (*reduce reuse, recycle*)
  - 6) Peningkatan Pelayanan Keamanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
- b. Menentukan Kelembagaan Pengelolaan Pasar
  - c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar
  - d. Mengadakan Pertemuan Secara Rutin Terkait Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I
  - e. Peningkatan Pengetahuan Dasar Bagi Para Pedagang
  - f. Reformasi Peraturan
  - g. Pengadaan Fasilitas Umum; CCTV, Ruang Bersama, Sarana Telekomunikasi, Koperasi Pasar
  - h. Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## **B. Saran**

1. Ke depannya pemerintah harus lebih inovatif pada kebijakan pengelolaan pasar pasca revitalisasi. Peningkatan dan inovasi pengelolaan pasar merupakan wujud dari pemaksimalan fungsi pasar sehingga apabila pasar dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pemerintah hendaknya melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani pengelolaan sampah, antara lain:
- h) Melibatkan *stakeholders* pasar yaitu pengunjung dan pedagang pasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pasar.
  - i) Melakukan manajemen pengelolaan sampah dengan baik yaitu dengan cara memisahkan sampah *organic* dan sampah *non organic*. Sehingga sampah *organic* dapat langsung didaur ulang.
  - j) Mewajibkan para pedagang untuk memiliki tempat sampah pada toko/los masing-masing.
  - k) Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mencari solusi alternative dalam memanfaatkan sampah pasar *organic* agar dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual.
  - l) Melibatkan paguyuban pedagang pasar dalam pengelolaan sampah pasar, yaitu sebagai pihak pemasar hasil pemanfaatan sampah pasar *organic*.
  - m) Melakukan kerjasama dengan pihak lain, yaitu dengan cara mendistribusikan hasil pengelolaan sampah pasar ke toko-toko.
  - n) Menyediakan sarana dan prasarana sampah di lingkungan pasar.

3. Melakukan reformasi peraturan terkait jam operasional petugas kebersihan, yaitu dengan membuat peraturan baru dimana kegiatan membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dilakukan dua kali pada pagi hari dan sore hari sehingga kebersihan pasar senantiasa terjaga. Selain itu perlu diterapkannya sistem *punishment* bagi pihak yang membuang sampah sembarangan seperti diberlakukan denda bagi pedagang dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan di lingkungan Pasar Tradisional Baturetno I. Sehingga para pedagang dan pengunjung akan berfikir ulang apabila akan membuang sampah sembarangan. Hal tersebut akan mendorong para pedagang dan pengunjung pasar untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah dipisahkan baik *organic* maupun *non organic*. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam hal kebersihan sehingga tidak didapati pihak yang mengeluh tentang masalah tersebut.
4. Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, pemerintah hendaknya lebih *responsive* (memiliki daya tanggap), seperti pembentukan tim khusus pemeliharaan sarana dan prasarana yang melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.
5. Untuk mengatasi kebingungan pengunjung dalam menemukan pedagang langganannya, dapat diatasi oleh pihak pengelola pasar

dengan membuat papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi. Papan-papan tersebut dapat dipasang pada tiap-tiap pintu masuk pasar. Selain hal tersebut, papan nama keterangan lokasi zonasi sebaiknya dipasang pada tiap-tiap tangga sehingga akan memudahkan pengunjung untuk mencari lokasi pedagang yang diinginkan. Sehingga pengunjung akan lebih nyaman untuk berbelanja serta proses berbelanja lebih efektif dengan adanya papan nama keterangan lokasi zonasi yang terpasang.

6. Kedepannya pemerintah harus memfokuskan pada aspek pendapatan sehingga pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri kedepannya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga pengelolaan pasar dari sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem parkir dan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana saling terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2002. "*What is Governance?*", diakses pada tanggal 12 November 2017 dari <http://web.worldbank.org/>.
- Alfianita E., Wijaya, Andy F., Siswidiyanto. 2015. Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif *Good Governance*: Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JPA)*. 3(5), 758-762
- Assauri, S. 2004. *Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ayuningsasi, Anak Agung Ketut. 2012. *Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi universitas Udayana: Denpasar-Bali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2017: "*PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2015*", diakses pada 16 Oktober 2017 dari <http://wonogirikab.bps.go.id/>.
- Biro Hubungan Masyarakat. 2016. "*Mendag: Target Revitalisasi Pasar 2015 Tercapai*", diakses pada 10 Desember 2017 dari <http://http://www.kemendag.go.id/>.
- Caiden, Gerald E., and Siedentopl, Hainrich. 1982. *Strategies for Administrative Reform*. Massachussets-Toronto: Lexington Bocks.
- Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Wonogiri tahun 2016.
- Cheema, G. S. 2007. *Linking Government and Citizens through Democratic Governance dalam Public Administration and Democrtatic Government Serving Citizens*. New York: 7<sup>th</sup> Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government. United Nations.
- EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration). 2000. *From Government to Governance*. Phillipines.
- Grindle, M.S. 1997. (Editor), *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA: Harvard Institute for International Development.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.



- Indradi, S. S. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek YPN.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*Pengertian Revitalisas*” (Online).
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
- Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
- Kurnia, Intan. 2014. *Perkembangan Diacronis Administrasi Publik (Dari New Public Management Ke Good Governance)*. Jurnal hal:319.
- Laporan Buku Kas Pasar Kabupaten Wonogiri di Baturetno, 2017.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masitoh, Eis Al. 2013. *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Milen, Anneli. 2006. *Capacity Building: Peningkatan Kinerja Sektor Publik*. Pembaruan: Yogyakarta.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi: UI-Press.
- Moleong. 2005. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



Narwoko, J.D. dan Suyatno, B. 2004. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.

Nurhayati, Siti Fatimah. 2014. Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 18(1) : 49-56.

Nusantoro, Ella., dan Priscilla Tjitra. "Indonesia Consumer Survey 2013", diakses pada 10 Oktober 2017 dari <http://www.nielsen.com/>.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Prijono T, Mandala, M. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Retnaningsih, Dwi dan Teguh Suprpto. 2016. *Kajian Model Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri*. Litbang Iptek: Wonogiri.

\_\_\_\_\_, hlm. 38.

RPJMD Kabupaten Wonogiri 2016-2021

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik: Membangun Sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Madar Maju.

\_\_\_\_\_. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV. Madar Maju.

Skema Rencana Proyek Revitalisasi Pasar Baturetno I.

- Sekretariat SP2KP. 2016. "*Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat*", diakses pada 10 Desember 2017 dari <http://ews.kemendag.go.id/>.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2012. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Edisi Kedua. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Soeprapto, Riyadi. 2007. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8152:2015 tentang Pasar Rakyat.
- Sudarman, Ari. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Sudarmi, S. dan Waluyo. 2008. *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono. 2007. *Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya* Malang, 3 Maret 2007.
- Sukirno, S. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2002. *Ilmu Pemerintahan*. Edisi revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tjokroamidjojo, B. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Urban Sector Development Reform Project*, II-1, 2013
- Wijaya, A.F., dan Danar, O.R. 2014. *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Malang: UB-Press.
- Website [humas.wonogirikab.go.id](http://humas.wonogirikab.go.id)

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang. Penerbit IKIP Malang.

\_\_\_\_\_. 2007. *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi*.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.





# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 9 Februari 2018

Nomor : 070/ 1289 / 209.4/ 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada,  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
di  
SEMARANG

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
Nomor : 1753/UN10.F03.11.11/PN/2018  
Tanggal : 2 Februari 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Ayu Rahma Darwati  
A l a m a t : Klampisan Gedawung, Kismantoro, Wonogiri  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pengelolaan Pasar Tradisional Baturetno I Pasca Revitalisasi dalam Perspektif Capacity Building"  
Tujuan/bidang : Penelitian, Riset / Administrasi Publik  
Dosen Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Si  
Peserta : -  
Waktu : 3 bulan  
Lokasi : Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



**Tembusan :**

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang ;  
2. Yang bersangkutan.

NIP. 19620116-198903 1 006





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
dpmpptsp@jatengprov.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/4929/04.5/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/1289/209.4/2018 Tanggal : 9 Februari 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AYU RAHMA DARWATI
2. Alamat : Klampisan RT 01/RW 05, Gedawung, Kismantoro, Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BATURETNO I PASCA REVITALISASI DALAM PERSPEKTIF CAPACITY BUILDING
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Wonogiri/Disperindagkop Kabupaten Wonogiri/Pasar Baturetno I
- c. Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi
- d. Waktu Penelitian : 01 Maret 2018 sampai 01 Juni 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. Sarwono, M.Si
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya Malang

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 Februari 2018

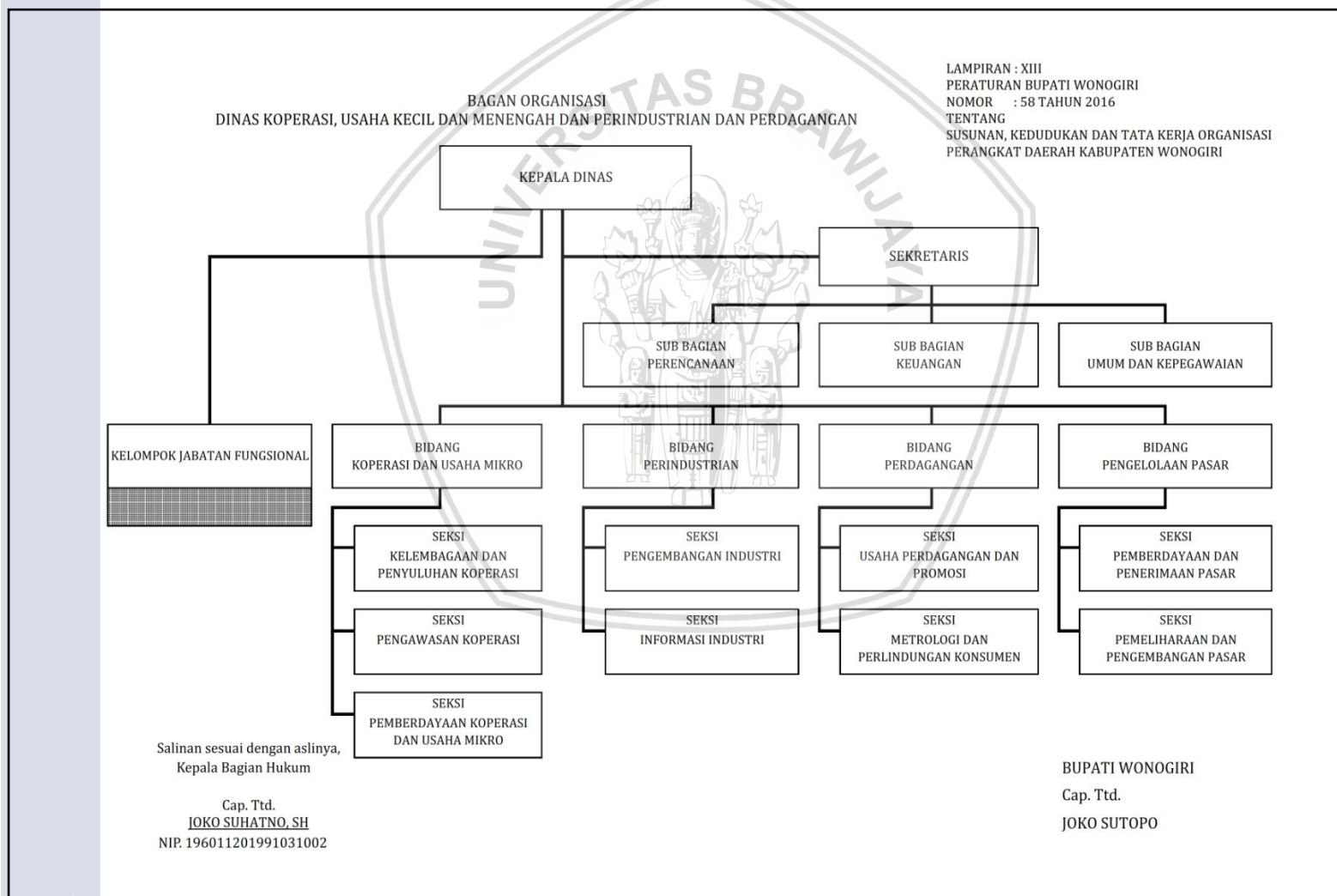
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

Lampiran 2

**Struktur organisasi Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri**





Lampiran 3

**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri  
Tahun 2016 – 2021**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1.	<b>MENINGKATKAN KONTRIBUSI KOPERASI DAN USAHA MIKRO PADA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH</b>	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1.Pertumbuhan Usaha Mikro	3,00	4,75	Meningkatnya Kompetensi SDM dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang Dibina	10,00	11,50
			2.Pertumbuhan Koperasi Sehat	2,00	4,50	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	2,50	4,50
2.	<b>MENINGKATNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING</b>	Meningkatkan Nilai Perdagangan	Nilai Ekspor (dalam jutaan rupiah)	188.000	190.000	1.Meningkatnya Jenis Komoditas Ekspor	Jenis Komoditas Ekspor	10	15
						2. Meningkatnya Kontribusi Sektor	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	16.00	17,25

						Perdagangan Dalam PDRB			
						3. Meningkatnya Omzet Pedagang Pasar Rakyat	Jumlah Omzet Pedagang Pasar Rakyat (dalam juta rupiah)	0	828.685.201
						4. Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian	Persentase Kontribusi Industri dalam PDRB	15,50	17,40

## Lampiran 4

### Dokumentasi



**Gambar 6.1** Los daging berada di lantai dua Pasar Tradisional Baturetno I  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Gambar 6.2** Lokasi bongkar muat barang dagangan di lantai dua Pasar Tradisional Baturetno I  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Gambar 6.3** Pos Satpam di Pasar Tradisional Baturetno I  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Gambar 6.4** Petugas kebersihan sampah di Pasar Tradisional Baturetno I  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti*



**Gambar 6.5 Mushola  
Pasar Tradisional  
Baturetno I**  
*Sumber: Dokumentasi  
Peneliti*



**Gambar 6.6 Kamar  
mandi/WC umum di  
Pasar Tradisional  
Baturetno I**  
*Sumber: Dokumentasi  
Peneliti*

## Lampiran 5

**CURICULLUM VITAE**

Nama : Ayu Rahma Darwati  
Nomor Induk Mahasiswa : 145030101111046  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 26 Maret 1996  
Alamat : Klampisan RT/W 01/05, Gedawung, Kismantoro,  
Wonogiri, Jawa Tengah  
Status : Belum Menikah  
Telepon : 0856 4748 6100  
E-mail : ayurahma69@gmail.com  
Riwayat Pendidikan Formal :  
1. TK Al-Istiqomah (2001 – 2002)  
2. SD N 1 Gedawung (2002 – 2008)  
3. SMP N 1 Kismantoro (2008 – 2011)  
4. SMA N 1 Purwantoro (2011 – 2014)  
5. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang (2014 – 2018)